

WAHANA HIJAU
Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah
ISSN 1858-4004
Volume 2, Nomor 3, April 2007

DAFTAR ISI

Regional Branding: Strategi Memasarkan Daerah <i>Syafrizal Helmi</i>	Hal. 117 – 123
Analisis Struktur Pasar CPO: Pengaruhnya terhadap Pengembangan Ekonomi Wilayah Sumatera Utara <i>Sya'ad Afifuddin, Sinar Indra Kusuma</i>	Hal. 124 – 136
Mengantisipasi Banjir Besar Kota Medan <i>Bachtiar Hassan Miraza</i>	Hal. 137 – 141
Perencanaan Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah (<i>Spatial Planning and Regional Planning</i>) <i>Sirojuzilam</i>	Hal. 142 – 149
Implementing Geographic Information System for Land Use and Spatial Planning <i>Wahyu Ario Pratomo</i>	Hal. 150 – 155
Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sektor-Sektor Berpotensi yang Dapat Dikembangkan di Pemerintah Kota Medan <i>Keriahen Tarigan</i>	Hal. 156 – 167

WAHANA HIJAU	Volume 2	Nomor 3	Hal.: 117 – 167	Medan, April 2007	ISSN: 1858-4004
--------------	----------	---------	-----------------	-------------------	-----------------

REGIONAL BRANDING: STRATEGI MEMASARKAN DAERAH

Syafrizal Helmi

Staf Pengajar Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi USU

Abstract: *Using technology in global economic makes every information and communication wide fast. Being the biggest country not only affected by natural resources, big population or strategic location but also how to attract the investor to invest his capital in the region. So, every region must build his brand. Every region must make the citizen as marketers. By marketing communication and media, region will have different to other region because they have unique brand and emotional branding. Good regional branding can attract emotional part of peoples (customer loyalty) appealing to the feeling dimension to which consumers react with feelings of warmth, affection and belonging because they see these brand as extension of themselves, a good fit to their personality, lifestyle, aspiration and behavior (citizen brand).*

Keywords: *brand, regional branding, investor*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dalam perekonomian global memungkinkan data mengalir dengan cepat melalui kabel dan serat optik atau transmisi satelit sehingga memungkinkan menembus batas-batas ruang dan waktu. Dalam kondisi ini sebuah wilayah tidak harus diberkati dengan kekayaan alam, populasi besar, militer yang kuat atau lokasi yang strategis untuk menjadi pemain utama dalam panggung bisnis global.

India misalnya berhasil menjadi negara hebat karena banyaknya PhD dalam bidang sains. Cina setelah revolusi kebudayaan berhasil menerapkan agenda otonomi daerahnya sehingga wilayah-wilayah otonom sukses secara ekonomi karena menjalin bisnis dengan negara-negara lain. Perdana Menteri Cina Wen Jiabao, dalam Kongres Rakyat Nasional ke-10 mengatakan akan melakukan transformasi militer dari mesin-mesin perang menjadi aplikasi teknologi informasi. Saat ini Cina mungkin negara yang paling mendapatkan manfaat dari perekonomian global dengan tingkat pertumbuhan 10% selama 4 tahun terakhir (*Kompas*, 6 Maret 2007). Hal ini terbukti menjadi negara pemilik cadangan devisa terbesar di dunia setelah Jepang.

Irlandia walaupun memiliki letak geografis yang sangat jauh dari pasar potensial (berada diperbatasan Eropa Barat), mampu menjadi negara berperingkat pertama dalam AT Kearney/*Foreign Policy Globalization Indeks*, hal ini disebabkan pemerintah Irlandia *concern* terhadap pendidikan serta peningkatan keahlian

komputer di semua sektor. Hal ini memungkinkan Irlandia menciptakan ribuan lapangan kerja baru.

Finlandia, walaupun berada di bahu timur laut baltik, di mana pelabuhannya jauh dari lalu lintas perdagangan dan selalu beku terkena es, mampu menjadi negara yang paling kompetitif mengungguli Amerika Serikat dan Singapura serta meraih nilai tertinggi untuk konektivitas dan kemampuan dan dipandang paling *responsive* terhadap IT dan *e-business*. Saat ini Nokia Menjadi perusahaan *handphone* terbesar di dunia.

HASIL

Sebenarnya pelajarannya apa yang bisa kita tarik, suatu daerah yang terisolasi, jauh dari pasar potensial, kekayaan alam yang minim mampu menjadi pemain global kelas dunia. Ohmae (2005) menyatakan salah satu elemen keberhasilan daerah/negara ini adalah kemampuannya memberikan merek pada dirinya sendiri dan menawarkan sesuatu yang berbeda (unik) dan memisahkannya dari persaingan. Kim dan Mouborgne (2005) menyatakan untuk menghindari persaingan (kompetisi) yang akan berakibat merugikan dibutuhkan strategi samudera biru (*blue ocean strategy*) samudera biru ditandai oleh ruang pasar yang belum terjelajahi, penciptaan permintaan, dan peluang pertumbuhan yang sangat menguntungkan, ketimbang dengan cara memperluas batasan-batasan industri yang sudah ada, dalam samudera biru, kompetisi tidak relevan karena aturan-aturan baru akan dibentuk.

Implementasinya bagi daerah adalah untuk berkompetisi daerah tidak harus menerapkan pajak yang rendah, insentif besar bagi pengusaha dan pebisnis, atau menekan gaji buruh sekecil mungkin. Hal tersebut hanya akan menciptakan samudera merah (penuh dengan kompetisi) yang pada akhirnya hanya akan merugikan daerah itu sendiri dan mengorbankan penduduk daerah yang menjadi tenaga kerja.

Kemampuan Memberikan Merek

Brand is everthing, merek (*brand*) adalah kepercayaan. Melalui merek produk dapat keluar dari komoditisasi (*ordinary*) menjadi unik (*extraordinary*). Bagi investor ketika akan melakukan investasi di suatu daerah/negara mereka akan melakukan survei tentang kondisi daerah tersebut mulai dari kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, ketersediaan bahan baku, infrastruktur, ketersediaan SDM hingga peraturan pemerintah.

Bagi daerah-daerah yang biasa-biasa saja tentu saja tidak akan menjadi pilihan investor untuk menanamkan investasinya. Untuk itu diperlukan suatu aktivitas pengelolaan *image* di suatu daerah (*brand image*) agar daerah tersebut tidak terkena cap yang jelek bagi investor. *Image* bangsa kita dahulu dikatakan sebagai negara yang aman, damai, penduduknya ramah-tamah. Sekarang *image* negara kita jelek karena dianggap sebagai negara yang tingkat korupsinya tinggi, tidak aman karena seringkali terkena bom atau bencana alam hingga iklim yang tidak baik baik kondisi bisnis (demonstrasi, peraturan yang tumpang tindih, dsb.). Akibatnya sebagian investor melarikan

investasinya ke negara lain seperti Malaysia, Thailand, Vietnam atau RRC. Bisa dibayangkan berapa banyak kesempatan kerja yang hilang, penggangguran yang terjadi akibat persepsi yang buruk mengenai negara ini. Al Ries dan Trout menyebutnya *perception is better than reality* (persepsi lebih baik dari realitas).

Secara realitas kejadian ada yang di negara ini terkadang terlalu dibesar-besarkan media. Untuk itu daerah sekarang tidak hanya bisa mempercayakan pengelelolaan *image* daerahnya kepada humas saja. Akan tetapi yang dibutuhkan adalah bagaimana memberdayakan lembaga ini secara lebih serius. Kartajaya (2005) menyebutkan *everyone is marketer*. Agar sebuah daerah mempunyai *good image* diperlukan birokrasi (PNS) yang mengedepankan kualitas pelayanan (*sevice quality*) sehingga pelanggan (masyarakat) menjadi puas. Persepsi yang baik akan menimbulkan *image* yang baik.

Citizen Brand

Untuk menghindari samudera merah dibutuhkan daerah yang mempunyai karakteristik yang unik akan menciptakan kesan bagi pengunjungnya (*memorable experience*), membanggakan penduduknya karena layanan birokrasi yang baik, terpercaya dan handal. Dalam kondisi ini setiap masyarakat menjadi *marketer* dan PR (*public relation*) bagi daerahnya sendiri. Dibutuhkan pengelolaan *brand image* yang baik agar suatu produk/jasa yang ditawarkan diterima oleh masyarakat. Untuk itu produk/jasa yang ditawarkan harus unik dan menarik.

Tabel 1. Index Persepsi Korupsi

Index Persepsi Korupsi di Beberapa Negara					
Negara	Parpol	Legislatif	Sektor publik	Kepolisian	Peradilan
INDIA	4.2	3.5	3.2	4.3	3.4
INDONESIA	4.1	4.2	3.6	4.2	4.2
JEPANG	4.0	3.7	3.6	3.6	3.0
MALAYSIA	3.5	3.0	3.3	3.8	2.8
PAKISTAN	4.0	3.9	3.6	4.4	3.6
FILIPINA	4.0	3.9	3.2	3.9	3.4
SINGAPURA	2.1	1.8	2.5	1.9	2.0
KORSEL	4.3	4.2	3.7	3.2	3.5
TAIWAN	4.5	4.5	3.7	4.1	3.9
THAILAND	3.7	2.9	3.2	3.6	2.6

Sumber: Media Indonesia, 5 Maret 2007

Karena terlalu banyaknya daerah yang memiliki karakteristik yang sama maka *brand* harus dirubah menjadi *emotional branding* agar menjadi unik. Gobe (2005) menyatakan *emotional branding* sebagai campuran yang dinamis dari pengalaman pancaindra, imajinasi, antropologi, dan pendekatan visioner menuju perubahan. Perubahan ini membutuhkan visi, misi, dan aksi yang benar dan terencana. Malaysia misalnya agar daerahnya dikunjungi melakukan persiapan serius melalui program *malaysia tourims*. Dengan *tagline* "Truly Asia" Malaysia memposisikan (*positioning*) daerahnya sebagai Asia sebenar-benarnya. Persiapan untuk program ini dilakukan secara serius melalui program terbang murah ke Malaysia (*visit Malaysia*), *great sales*, festival, hotel yang nyaman. Malaysia ingin pengunjung yang datang merasa betah, nyaman dan terkesan (*memorable experience*) sehingga mereka ingin pengunjung akan kembali lagi atau merekomendasikan Malaysia sebagai daerah tujuan wisata kepada rekan-rekannya (*customer loyalty*)

Bali merupakan contoh daerah yang memiliki *emotional branding*. Ketika terjadi ledakan Bom di Bali, semua orang (tidak hanya penduduk Bali saja tetapi penduduk lain yang pernah ke Bali (wisatawan lokal dan asing) merasa berduka. Berbagai upaya (program di televisi) dilakukan untuk memulihkan kembali Bali menjadi daerah yang nyaman dan aman. Mengapa tidak dilakukan juga terhadap daerah lain seperti Poso atau Medan? Sekarang setiap kepala daerah harus berfikir bagaimana menciptakan *sense of ownership* di kalangan masyarakat (*citizen*), sehingga masyarakat menjadi cinta (*love*) bukannya takut (*fear*) terhadap suatu daerah. Memunculkan *sense of ownership* di kalangan masyarakat, kepala daerah (*government*) dalam membuat sebuah program tidak hanya sekedar menjalankan saja tetapi harus melibatkan warga sebagai manusia yang dihargai melalui menanyakan pendapatnya terhadap apa yang diinginkannya. Kepercayaan yang dibangun bersifat *take and give*, di mana masyarakat memberikan kepercayaan penuh dan *government* mengelolanya dengan baik.

Gobe (2006) seorang pakar *emotional branding* menyebutnya sebagai konsep *citizen branding* yaitu konsep yang berusaha membawa *spirit* merek sehingga setiap konsumen merasa ingin menjadi bagian dari merek tersebut yang akhirnya akan menciptakan budaya yang saling menghargai, tidak hanya

factual honesty melainkan juga *emotional honesty*. Untuk itu pemerintah harus peka dan harus tahu apa yang menjadi harapan dan impian warganya, bagaimana kehidupan mereka sehari-hari, apa yang membuat mereka bahagia dan takut. Perusahaan harus bisa memperoleh informasi yang bersifat humanistik tidak sekedar permukaan dan angka-angka saja.

PEMBAHASAN

Strategi Memasarkan Daerah

Analisis Lingkungan

Kartajaya dan Yuswohadi (2005) menyebutkan secara umum memasarkan daerah berarti mendesain suatu daerah agar mampu memenuhi dan memuaskan keinginan dan ekspektasi target *market*-nya. Target *market* suatu daerah tentu saja penduduk dan masyarakat daerah tersebut yang membutuhkan layanan publik yang memadai, TTI (*traders, tourists, investors*) baik dari dalam maupun luar daerah, *talents* (SDM berkualitas), *developers* (pengembang), *organizers* (*event organizer*) dan seluruh pihak yang memiliki kontribusi dalam membangun keunggulan bersaing daerah.

Agar sebuah strategi sebuah daerah berjalan dan dinamis maka harus dilakukan analisis lingkungan daerah. Aspek yang dilihat adalah lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal meliputi potensi suatu daerah, keuangan, produk unggulan, kelemahan dsb. Sedangkan analisis lingkungan eksternal meliputi analisis perubahan (*change*), analisis pesaing (*competitor*), dan analisis pelanggan (*customer*).

Analisis perubahan (*change*) meliputi teknologi, dinamika ekonomi, perkembangan politik, regulasi, pergeseran sosial budaya, dan perubahan pasar. Sedangkan analisis pesaing (*competitor*) melihat tiga dimensi dari pesaing yakni (*general, aggressiveness, dan capability*)

Dimensi *general* menggambarkan jumlah pesaing baik riil maupun potensial. Dimensi *aggressiveness* menggambarkan seberapa jauh para pesaing menerapkan strateginya secara efektif dan kreatif. Sedangkan dimensi *capability* melihat kemampuan pesaing dari berbagai aspek yakni kepemimpinan daerah, kondisi faktor produksi daerah (tenaga kerja, infrastruktur dan teknologi).

Kota Medan misalnya secara geografis berada di Propinsi Sumatera Utara, tentu saja jika kita lihat persaingan maka yang menjadi indikator adalah pertumbuhan kota-kota di

Sumatera Utara atau sekitarnya. Jika ini dilakukan maka akan kelihatan Medan kota yang hebat, maju dan berkembang. Dalam analisis pesaing, Kota Medan seharusnya dibandingkan dengan kota-kota besar di Indonesia misalnya Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Semarang atau Jakarta. Bahkan karena Kota Medan terletak di segitiga kawasan pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Thailand (IMT-GT) pertumbuhan kota Medan harus juga dibandingkan dengan Kota Penang (Malaysia) karena karakteristik kota yang sama.

Langkah berikutnya adalah membangun visi daerah. Visi merupakan *starting poin* bagi seluruh upaya daerah dalam membangun strategi pengembangan daerah. Dengan adanya visi gambaran jelas mau kemana daerah ini nantinya akan terlihat. Bagi pebisnis (*investor*) akan lebih mudah menyesuaikan bisnis apa yang patut dikembangkan. Bagi *government* akan menjadi tolak ukur target dan kinerja yang akan dicapai dan bagi masyarakat (*society*) akan menimbulkan kepastian, kenyamanan, dan keamanan.

Kartajaya (2005) menyebutkan rumusan visi sebuah daerah sebaiknya (1) *motivating and inspiring*, (2) *Stretch*, (3) *commitment, enthusiasm & pride*, (4) *clear and concrete*, (5) *achivable not fantasy*, (6) *simple and easy to communicate*. David (2001) menyebutkan rumusan visi sebaiknya singkat dan hanya satu kalimat agar mudah diingat. Visi yang ada harus dikomunikasikan kepada seluruh *stakeholder* daerah misalnya melalui pemanfaatan media yang ada.

Segmentasi, Targeting, Positioning

Segmentasi, targeting, positioning dilakukan untuk memenangkan *mind share*. Segmentasi dimaksudkan sebagai *mapping strategy* atau strategi memetakan pasar. Setelah pasar disegmentasikan ke dalam kelompok-kelompok pelanggan potensial dengan karakteristik dan perilaku serupa, kemudian harus memilih segmen pasar mana yang akan dituju. Aktivitas ini disebut *targeting* yaitu mengalokasikan sumber daya daerah secara efektif melalui pemilihan target pasar yang tepat. Oleh karena itu, *targeting* disebut pula sebagai *fitting strategy*. Elemen terakhir adalah *positioning (being strategy)*. Yaitu menempatkan merek dibenak pelanggan (*consumer's mind*). Jadi setelah memetakan dengan segmentasi, dan menyesuaikan sumber daya daerah ke segmen pasar yang dipilih melalui *targeting*,

kemudian daerah harus mendefinisikan keberadaan produk dan layanan daerah di benak *target market*.

Menurut Kartajaya dan Yuswohady (2005) segmentasi yang efektif harus memenuhi berbagai syarat berikut ini. (1) Pasar harus dilihat dari sudut yang unik dan berbeda dari pesaing. (2) Metode segmentasi yang digunakan haruslah mungkin mencerminkan perilaku pembelian/penggunaan dan menentukan alasan pembelian (*reason-to-buy*) si investor. Dengan mengetahui *reason-to-buy investor*, akan dapat menentukan strategi produk, promosi dan harga secara lebih tajam. (3) Segmen-segmen yang teridentifikasi haruslah memiliki ukuran yang cukup signifikan dan memiliki prospek yang baik untuk berkembang di masa mendatang.

Setelah segmen-segmen ini teridentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah mengevaluasi segmen-segmen mana saja yang akan dilayani. Proses mengevaluasi dan memilih satu atau beberapa segmen yang akan dilayani inilah yang disebut sebagai *targeting*. Dalam *targeting* ada empat kriteria *targeting* yakni: (1) segmen pasar yang dipilih haruslah ukuran yang cukup besar sehingga dapat menjamin perolehan pendapatan daerah. Di samping itu, segmen tersebut harus memiliki *growth* yang cukup signifikan agar mampu menjamin pendapatan daerah di masa datang. (2) Keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Melalui kriteria ini daerah ingin meninjau apakah ia memiliki cukup sumber daya dan kemampuan untuk melayani target TTI-TDO yang dipilihnya. Agar dapat menghasilkan manfaat maksimal bagi target TTI-TDO, daerah yang dipilih tak cukup hanya memiliki sumber daya yang memadai. Lebih dari itu ia juga harus memiliki keunggulan kompetitif agar dapat membangun diferensiasi (faktor pembeda) untuk mengungguli daerah pesaing di segmen tersebut. (3) Situasi persaingan (*competitive situation*). Permasaran daerah harus mempertimbangkan situasi persaingan, yang langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi daya tarik (*attractiveness*) dari segmen TTI-TDO yang dipilih. Berbagai faktor yang harus diperhatikan oleh daerah dalam hal ini antara lain adalah: intensitas persaingan antar daerah, adanya produk substitusi dari daerah lain, regulasi pemerintah, *barrier to entry*, dan sebagainya.

Positioning adalah menyangkut upaya membangun rasa saling percaya antara daerah dan setiap target pelanggannya (*lead your*

costomer credibly). Dengan modal kepercayaan ini suatu daerah akan selalu ada diingatan (benak) setiap TTI-TDO. *Positioning* pada hakikatnya adalah sebuah janji yang diberikan oleh daerah. Ketika Hong Kong memposisikan dirinya melalui sebagai *Asia's 'world city'*, maka sesungguhnya Hong Kong berjanji kepada pelanggannya bahwa ia juga merupakan kota yang selalu hidup dan dinamis. Begitu juga ketika Singapura memposisikan dirinya sebagai *'The New Asia'*, sesungguhnya Singapura berjanji kepada para investor dan wisatawan, bahwa Singapura merupakan perpaduan antara *the best of the west* (transparansi, efisiensi, teknologi) dan *the best of the east* (keramahan, harmoni, sopan santun). Begitu pula ketika Singapura mengganti *positioning*-nya menjadi *"Uniquely Singapore"* maka apa yang ditawarkan oleh negara ini harus benar-benar unik yang tidak ditemukan oleh negara manapun.

Tabel 2. Positioning Statement

Negara	Positioning
Thailand	: "Amazing Thailand"
Malaysia	: "Trully Asia"
Hong Kong	: "Asia's Word City"
Phiilipina	: "WOW Philippines" (<i>Wealth of Wonder</i>)
Singapore	: "Uniquely Singapore"
Indonesia	: "Ultimate in Diversity"
Vietnam	: "A Destination For The New Millenium"
Macao	: "Welcome you"
Nepal	: "Mt Everest and more"
Yogya	: "Never Ending Asia"
Perth	: "Best on Earth in Perth"
Osaka	: "Sports Paradise"
Bangalore	: "The Sillicon Valley of India"

Sumber: Kartajaya dan Yuswoadi (2005)

Kemampuan daerah memenuhi janji kepada pelanggannya inilah yang akan menentukan kepercayaan dan kredibilitas di atas. Semakin daerah mampu memenuhi janji tersebut, semakin tinggi pula kepercayaan dan kredibilitas di mata pelanggan, dan akhirnya, semakin kokoh pula *positioning*-nya di benak pelanggan.

Taktik: Diferensiasi dan Marketing Mix

Elemen pertama taktik adalah diferensiasi. Diferensiasi adalah upaya membedakan diri dengan daerah pesaing baik dalam hal konten, konteks, dan infrastruktur. Elemen kedua adalah *marketing mix* (bauran

pemasaran). *Marketing mix* mengintegrasikan produk, harga, saluran distribusi, dan promosi daerah. Sedangkan elemen ketiga adalah *selling*. *Selling* adalah upaya menjual potensi daerah dengan melakukan *relationship* jangka panjang TTI-TDO.

Diferensiasi didefinisikan sebagai upaya merancang produk dan layanan daerah agar unik dan berbeda dari produk dan layanan daerah pesaing. Upaya merancang keunikan dan perbedaan ini bisa berdasarkan konten atau apa yang ditawarkan kepada TTI-TDO (*what to offer*). Medan misalnya membangun *image* sebagai kota jasa dan perdagangan. Untuk itu dibutuhkan produk layanan yang berbeda dibanding kota-kota lain, misalnya pelayanan yang cepat dan tidak birokratis. Konteks atau bagaimana cara Anda menawarkannya (*how to offer*), misalnya kemudahan melalui *one-stop-shoppng services* di mana layanan birokrasi, dukungan operasional dan transportasi melalui pelabuhan atau bandara, dilakukan oleh satu institusi secara terintegrasi dan efisien. Berikutnya infrastrukturnya atau faktor-faktor pemungkin (*enabler*) diferensiasi daerah. Misalnya penerapan *entrepreunial goverment*, penerapan IT, dsb.

Pertanyaannya kemudian adalah, perbedaan yang bagaimana yang mampu menghasilkan diferensiasi yang kokoh dan berkelanjutan (*sustainable*)? Kartajaya dan yuswohady (2005) menyatakan ada tiga syarat yang harus dipenuhi sebagai acuan dalam penentuan diferensiasi. (1) Diferensiasi haruslah mampu mendatangkan nilai dan manfaat *excelent* kepada TTI-TDO. Produk atau layanan daerah boleh berbeda, tapi tentu tidak boleh asal beda. Perbedab tersebut harus mampu mendatangkan nilai dan manfaat yang *excellent* kepada TTI-TDO. Semakin perbedaan tersebut mendatangkan manfaat yang tinggi, semakin kokoh pula diferensiasi yang dihasilkan. (2) diferensiasi merupakan keunggulan dibanding pesaing. Sebuah diferensiasi akan kokoh jika Anda menciptakan perbedaan dengan pesaing dan perbedaan tersebut mencerminkan keunggulan Anda terhadap pesaing. Diferensiasi akan kokoh jika Anda mampu keluar dari paritas pesaing alias berada di atas rata-rata pencapaian pesaing umum. (3) Agar diferensiasi daerah kokoh dan *sustainable*, ia harus memiliki keunikan sehingga tak gampang dikopi pesaing.

Tabel 3. Skor Diferensiasi

Diferensiasi	Daerah	Kompetitor I	Kompetitor II	Kompetitor III
Konten				
1. Sumber daya				
2. Lokasi strategis				
3. Layanan publik				
4. Pemerintah yang stabil				
Konteks				
1. <i>Responsiveness</i>				
2. <i>Reability</i>				
3. <i>Assurance</i>				
4. <i>Emphaty</i>				
5. <i>Tangibility</i>				
Infrastruktur				
1. SDM (<i>people</i>)				
2. Teknologi				
3. Fasilitas				

Sumber: Kartajaya dan Yuswoadi (2005)

Elemen kedua taktik pemasaran adalah *marketing mix* (bauran pemasaran). *Marketing mix* adalah bauran atau kombinasi dari apa yang ditawarkan daerah dan bagaimana tawaran itu disampaikan kepada pelanggan. *Marketing mix* mencakup dua dimensi yaitu *offer* yang mencakup produk (*product*) dan harga (*price*); serta akses (*access*) yang mencakup saluran distribusi (*place*) dan cara mempromosikan produk daerah (promosi).

- **Produk**

Produk daerah ini menjadi terdiri dari 5 jenis, yaitu: lokasi, layanan publik, infrastruktur dan suprastruktur daerah, atraksi, dan SDM daerah. Produk-produk daerah ini dapat berupa *tangible product* seperti lokasi, infrastruktur atau SDM daerah dan *intangibile product* seperti layanan publik dan suprastruktur.

- **Price (Harga)**

Setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh daerah memiliki harga. Harga dapat didefinisikan sebagai sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh TTI-TDO untuk produk dan layanan yang ditawarkan oleh daerah. Komponen harga dari produk dan layanan daerah di atas bermacam-macam. Dalam kasus investor yang akan mendirikan fasilitas produksi di suatu kawasan industri

misalnya, komponen harga mencakup antara lain: harga sewa tanah, pajak yang harus dibayar, biaya pelayanan publik seperti suplai air dan listrik atau biaya pengurangan surat izin investasi, biaya transportasi, dan layanan pelabuhan dan sebagainya.

- **Place**

Place bukanlah berarti lokasi, tetapi istilah *place* merujuk pada *channel* atau saluran distribusi. *Channel* sering diartikan sebagai semua pihak yang terlibat dalam proses menyediakan suatu produk dan servis agar dan TTI-TDO. Dalam pemasaran daerah, *channel* merupakan *contact point* antara daerah dan TTI-TDO. *Contact point* tersebut bisa berupa saluran penjualan langsung (*direct sales channel*), *telechannel*, *directmail*, dan internet).

- **Promosi**

Dalam memasarkan daerah, pemasar daerah tidak cukup hanya menghasilkan produk dan layanan yang *excellent*, menyusun strategi harga yang pas, dan memungkinkan produk dan layanan tersebut bisa diakses dengan baik oleh TTI-TDO. Promosi berarti aktivitas untuk mengkomunikasikan keunggulan produk Anda untuk mempengaruhi TTI-TDO agar mau berkunjung, membeli produk, atau berinvestasi di daerah. Dalam

mempromosikan produknya, daerah bisa memilih salah satu atau lebih dari bauran promosi (*promotion mix*). Dalam konteks pemasaran daerah bauran promosi biasanya mencakup alat-alat promosi berikut: iklan (*advertising*), *sales promotion*, *public relation and publicity*, *personal selling* dan *direct selling*. Pilihan berbagai alat promosi tersebut tergantung pada karakteristik pesan dan target audiens yang ingin dicapai. Target audiens potensial dengan karakteristik yang berbeda disapa dengan media dan pesan yang berbeda pula.

Value: Merek, Servis, dan Proses

Elemen pertama dari *value* adalah merek. elemen pertama dari nilai, yaitu merek (*brand*), sebagai *value indicator* bagi suatu daerah. Sementara itu, kebutuhan dan harapan pelanggan. Servis sebagai "*value enhancer*". Elemen terakhir dari nilai pemasaran adalah proses. Proses tak lain merupakan nilai terbaik bagi pelanggan melalui proses di dalam maupun di luar mata rantai aktivitas mereka.

KESIMPULAN

Memasarkan sebuah daerah dibutuhkan konsistensi dan kerja keras. Seluruh aspek-aspek *marketing* daerah (visi, misi, *marketing mix*, diferensiasi, STP, dan *value*) dioptimalkan potensi penggunaannya. Sebuah daerah tidak bisa mengandalkan penerimaan APBD dari negara untuk membangun daerahnya. Diperlukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan peluang bisnis. Mengukur peluang bisnis di suatu daerah di masa sekarang tidak cukup hanya mengandalkan besarnya potensi kekayaan sumber daerah alam atau tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB) di daerah tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

Gobe, Marc, 2005, *Emotional Branding*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Gobe, Marc, 2006, *Citizen Brand*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Kartajaya, Hermawan dan Yuswohady, 2005, *Attracting Tourists, Traders, Investor: Strategi Memasarkan Daerah*, Penerbit Gramedia Jakarta.

Kartajaya, Hermawan, 2006, *On Brand*, Seri 9 Elemen Marketing, MarkPlus & Mizan, Bandung.

Kartajaya, Hermawan, 2006, *On Marketing Mix*, Seri 9 Elemen Marketing, MarkPlus & Mizan, Bandung.

Kartajaya, Hermawan, 2006, *On Process*, Seri 9 Elemen Marketing, MarkPlus & Mizan, Bandung.

Kartajaya, Hermawan, 2006, *On Segmentation*, Seri 9 Elemen Marketing, MarkPlus & Mizan, Bandung.

Kartajaya, Hermawan, 2006, *On Service*, Seri 9 Elemen Marketing, MarkPlus & Mizan, Bandung.

Kim, C.W., Mauborgne R., 2005, *Blue Ocean Strategy*, Penerbit Serambi, Jakarta.

Kompas 6 Maret 2007, *Menuju Kekuatan Adidaya*.

Kotler P., Kartajaya H., Den Huan, & Liu S., 2003, *Rethinking Marketing: Sustainable Marketing Enterprise In Asia*, Penerbit PT Prehalindo dan Mark Plus.

Media Indonesia, 5 Maret 2007.

Ohmae, Kenichi, 2005, *The Next Global Stage*, Penerbit Indeks, Jakarta.

ANALISIS STRUKTUR PASAR CPO: PENGARUHNYA TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH SUMATERA UTARA

Sya'ad Afifuddin

Dosen Magister Ekonomi Pembangunan SPs USU

Sinar Indra Kusuma

Alumnus S-2 PWD SPs USU

***Abstract:** The purpose of the study is to analyze the market structure of CPO and its impact on regional development of North Sumatra. Using multiple regression and descriptive analysis, the study shows that the market structure of CPO oligopsony, while export, export price, and domestic price of CPO have positive impact on regional development of North Sumatra.*

***Keywords:** market structure, regional economic development*

PENDAHULUAN

Pembangunan subsektor perkebunan khususnya kelapa sawit merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan pertanian serta merupakan bagian integral pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, (a) kelapa sawit merupakan penggerak utama (*prime mover*) pengembangan agribisnis kelapa sawit mulai dari hulu hingga ke hilir (Saragih, 1998), (b) pembangunan subsektor kelapa sawit merupakan penyedia lapangan kerja yang cukup besar dan sebagai sumber pendapatan petani; (c) kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang memiliki andil besar dalam menghasilkan devisa negara. Pada tahun 1997 ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 2,97 juta ton dengan nilai US \$ 1,45 milyar atau sama dengan 3,5% dari total penerimaan ekspor nonmigas Indonesia (BPS, 1997).

Kelapa sawit mempunyai produktivitas lebih tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya (seperti kacang kedele, kacang tanah, dan lain-lain), sehingga harga produksi menjadi lebih ringan. Selain itu karena masa produksi kelapa sawit yang cukup panjang (22 tahun) juga akan turut mempengaruhi ringannya biaya produksi yang dikeluarkan oleh pengusaha kelapa sawit. Kelapa sawit juga merupakan tanaman yang paling tahan hama dibandingkan tanaman lain.

Sebelum tahun 1979, perkebunan kelapa sawit masih diusahakan hanya oleh perusahaan perkebunan besar milik negara dan swasta. Sejak dekade 1980, sejalan dengan kebijaksanaan pengembangan perekonomian rakyat, telah terjadi perkembangan yang sangat pesat dari usaha perkebunan kelapa sawit rakyat yang bermitra dengan perkebunan besar sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa perkembangan perkebunan kelapa sawit terlihat semenjak tahun 1979 yaitu pada perkebunan rakyat (PR) dan perkebunan besar swasta (PBS), sedangkan pada perkebunan besar negara perkembangannya relatif lebih rendah dibandingkan PR dan PBS.

Perkebunan kelapa sawit tersebut saat ini tersebar di 16 propinsi dari 32 propinsi di Indonesia. Areal terluas di Pulau Sumatera (2.243.501 ha), khususnya di Propinsi Sumatera Utara (614.617 ha) dan Propinsi Riau (606.492 ha). Di Pulau Kalimantan luas areal perkebunan kelapa sawit pada tahun 1999 adalah 562.901 ha. Di samping Pulau Sumatera dan Kalimantan, perkebunan kelapa sawit terdapat di berbagai propinsi di pulau lainnya yaitu di Propinsi Jawa Barat (21.502 ha), Sulawesi Selatan (80.934 ha), Sulawesi Tengah (36.427 ha), dan Irian Jaya (29.855 ha). Ke depan, pengembangan kelapa sawit diarahkan ke Kawasan Timur Indonesia.

Tabel 1. Areal dan Produksi Kelapa Sawit Indonesia (Tahun 1968 – 2000)

No.	Uraian	1968	1979	1996	1997	1998	1999	2000
Luas Areal								
1	Perk. Rakyat	0	3	739	813	891	972	1.053
	TBM	0	0	302	321	350	328	361
	TM	0	0	437	492	541	644	692
2	Perk. Besar	79	174	427	449	489	494	501
	TBM	51	78	43	50	71	90	84
	TM	28	96	384	399	418	404	417
3	Perk. Besar	41	87	1.084	1.254	1.409	1.509	1.621
	TBM	27	39	477	570	669	637	634
	TM	14	48	607	684	740	872	987
	Jumlah	120	261	2.250	2.516	2.789	2.975	3.175
	TBM	78	117	822	941	1.090	1.055	1.079
	TM	42	144	1.428	1.575	1.699	1.920	2.096
II. Produksi (000)								
a. Minyak								
1	Perk. Rakyat	0	0	1.134	1.293	1.348	1.441	1.503
2	Perk. Besar	122	439	1.707	1.800	1.857	1.995	2.056
3	Perk. Besar	59	202	2.058	2.287	2.435	2.553	2.658
	Jumlah	181	641	4.899	5.380	5.640	5.989	6.217
b. Inti Sawit								
1	Perk. Rakyat	0	0	233	280	292	313	335
2	Perk. Besar	24	85	397	423	432	469	491
3	Perk. Besar	13	36	456	526	560	587	607
	Jumlah	37	121	1.085	1.229	1.284	1.369	1.433

Sumber: Dirjen Bina Produksi Perkebunan (berbagai tahun)

Catatan:

TBM = Tanaman Belum Menghasilkan

TM = Tanaman Menghasilkan

Sejalan dengan perkembangan luas areal, perkembangan produksi minyak sawit juga telah berkembang pesat. Jika pada tahun 1968 produksi minyak sawit baru sekitar 182 ribu ton, pada tahun 1999 produksinya telah mencapai 5.989 ribu ton, atau meningkat sebesar hampir 32 kali lipat (Tabel 1). Produksi tersebut sebesar 24,1% dihasilkan oleh perkebunan rakyat, 33,3% perkebunan negara dan 42,6% perkebunan besar swasta. Di masa mendatang produksi tersebut akan terus meningkat karena masih luasnya Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) yaitu 1.055 ribu ha atau 35,5% dari total areal. Di Pulau Sumatera yang saat ini merupakan sentra produksi kelapa sawit, produksi tertinggi terdapat di Propinsi Sumatera Utara (2.394 ribu ton pada tahun 1999) dan di Propinsi Riau (1.272 ribu ton).

Dari sisi ekspor dan impor pertumbuhan pesat produksi kelapa sawit telah meningkatkan volume dan nilai ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel Oil (PKO) Indonesia. Devisa negara yang diperoleh dari

ekspor produk kelapa sawit CPO dan PKO, mencapai US\$ 1.326 juta pada tahun 2000. Volume dan nilai ekspor CPO dan PKO dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Perkembangan volume cenderung meningkat sesuai dengan peningkatan produksi, sedangkan nilainya berfluktuasi sesuai dengan harga CPO dunia. Sedangkan impor CPO dan PKO pada tahun 2000 mencapai 4 ribu ton dan 1 ribu ton, rincian impor selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.

Dari sisi konsumsi CPO dalam negeri pada awalnya minyak sawit untuk mengisi selisih perkembangan permintaan yang tidak dapat diisi minyak kelapa, ternyata minyak sawit menjadi minyak utama dalam konsumsi masyarakat Indonesia. Penggunaan minyak sawit sebagian untuk pangan terutama (minyak goreng) sedangkan untuk industri oleokimia relatif masih kecil. Konsumsi CPO dan PKO Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 2. Ekspor CPO dan PKO Indonesia (Tahun 1968 – 2000)

No	Uraian	1978	1979	1996	1997	1998	1999	2000
1.	CPO (000 ton)	152	351	1.672	2.968	1.479	3.299	4.110
2.	PKO (000 ton)	0	0	341	503	347	598	579
	Jumlah (000 ton)	152	351	2.013	3.471	1.826	3.897	4.689
1.	CPO (juta US\$)	20	204	825	1.446	745	1.114	1.087
2.	PKO (juta US\$)	0	0	235	294	196	348	239
	Jumlah (juta US\$)	20	204	1.060	1.740	941	1.462	1.326

Sumber: BPS berbagai tahun

Tabel 3. Volume dan Nilai Impor CPO dan PKO Indonesia Tahun 1996 – 2000

No	Uraian	1996	1997	1998	1999	2000
I.	Volume (000 ton)					
1.	CPO	108	92	18	3	4
2.	PKO	3	3	1	1	1
	Jumlah	111	95	19	6	5
II.	Nilai (juta US\$)					
1.	CPO	61	55	8	2	4
2.	PKO	3	3	1	1	1
	Jumlah	64	58	9	3	5

Sumber: BPS berbagai tahun

Tabel 4. Konsumsi CPO dan PKO Indonesia Tahun 1996 – 2000

No	Uraian	1996	1997	1998	1999	2000
	Konsumsi (000 Ton)					
1	CPO	2.528	2.841	2.832	2.895	2.945
2	PKO	124	78	84	74	95
	Jumlah	2.652	2.919	2.916	2.985	3.030

Sumber: Oil World berbagai tahun, 2000

Dari sisi harga, perkembangan harga minyak sawit (CPO) di pasar domestik dan internasional sejak tahun 1996 sampai dengan 2000 berfluktuasi, harga rata-rata minyak sawit di pasar domestik dan internasional selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 5.

Posisi perkelapa-sawitan Indonesia di dunia adalah ranking kedua setelah Malaysia dengan pangsa produksi CPO Indonesia hanya 29,2% dan Malaysia sebesar 51,5% dari total produksi CPO dunia. Sedangkan pangsa ekspor CPO Indonesia hanya 21,1% dan Malaysia sebesar 65,4% dari ekspor CPO dunia. Produksi dan ekspor dunia dapat dilihat pada Tabel 6.

Dilihat dari prospek dan arah pengembangan perkelapa-sawitan Indonesia.

Komoditas kelapa sawit yang memiliki berbagai macam kegunaan baik untuk industri pangan maupun nonpangan, prospek pengembangannya tidak saja terkait dengan pertumbuhan permintaan minyak nabati dalam negeri dan dunia, namun terkait juga dengan perkembangan sumber minyak nabati lainnya, seperti kedelai, minyak kanola (*rape seed*), dan minyak bunga matahari. Berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan beberapa negara penghasil utama minyak sawit dan kajian rencana pengembangan ke depan, maka gambaran produksi minyak sawit menurut negara produsen dapat diikuti pada Tabel 7.

Dari Tabel 7 yang merupakan hasil kajian Oil World, terlihat bahwa produksi minyak sawit Indonesia pada tahun 2010

akan mulai melebihi produksi Malaysia bahkan pada tahun selanjutnya Indonesia akan menjadi negara produsen utama minyak kelapa sawit dunia. Hasil kajian ini, terutama untuk produksi Indonesia, sudah sejalan dengan upaya pengembangan kelapa sawit yang dilakukan oleh Indonesia.

Dari berbagai perkembangan dan kajian yang ada, terlihat bahwa ke depan persaingan

dalam usaha perkebunan kelapa sawit bukan saja terjadi antarsesama negara produsen melainkan juga persaingan dengan jenis minyak nabati lainnya, seperti minyak kedelai, minyak kanola, minyak bunga matahari dan lain-lain. Hal ini jelas terlihat dari gambaran tentang pangsa konsumsi minyak nabati yang kecenderungannya seperti pada Tabel 8.

Tabel 5. Harga Rata-Rata CPO di Pasar Domestik dan Internasional Tahun 1996- 2000

No	Uraian	1996	1997	1998	1999	2000
1	Domestik (Rp/kg) CPO	1.148	1.124	3.943	2.978	2.335
2	Internasional (US\$/ton) CPO	532	545	678	439	314
	PKO	731	657	677	700	418

Sumber: Laporan mingguan Bank Indonesia berbagai tahun

Tabel 6. Produksi dan Ekspor Dunia Tahun 1996-1999

No	Uraian	1996	1997	1998	1999	Pangsa (%)
I.	Produksi (000 ton)					
1.	Malaysia	8.386	9.057	8.315	10.553	51,5
2.	Indonesia	4.540	5.380	5.640	5.989	29,2
3.	Nigeria	600	680	690	720	3,5
4.	Columbia	410	441	422	500	2,4
5.	Thailand	375	390	370	410	2,0
6.	Lainnya	1.9723	1.886	1.243	2.304	11,4
	Dunia	16.234	17.844	16.680	20.476	100
II.	Ekspor (000 ton)					
1.	Malaysia	7.230	7.747	7.748	9.235	65,4
2.	Indonesia	1.851	2.968	1.479	2.979	21,1
3.	Singapura	289	298	241	270	1,9
4.	Papua N.G.	267	275	235	264	1,9
5.	Ivory Coast	99	73	83	105	0,7
6.	Lainnya	999	1.013	1.537	1.264	9,0
	Dunia	10.735	12.374	11.323	14.117	100

Sumber: Oil World, 2000

Tabel 7. Produksi Minyak Nabati Dunia (ribu ton)

Tahun	Nigeria	Indonesia	Malaysia	Lainnya	Total
1980	433	721	2.576	819	4.549
1985	307	1.243	4.133	1.149	6.832
1990	580	2.413	6.092	1.858	10.943
1995	780	4.480	7.596	2.507	15.363
2000	1.016	6.217	8.751	3.978	19.962
2005	1.297	8.891	9.901	4.154	24.243
2010	1.623	11.293	11.052	4.603	28.571
2015	1.995	13.438	11.595	5.067	32.095
2020	2.412	15.137	12.009	6.548	36.106

Sumber: Oil World, 1994 dan 1998

Tabel 8. Pangsa Produksi dan Konsumsi Minyak Nabati Dunia

No.	Uraian	1993-1997	1998-2002	2003-2007	2008-2012
I.	Total Produksi (000 ton)	70.778	83.680	95.624	108.512
	Pangsa (%)				
1.	M. sawit (CPO)	21,9	24,8	26,5	27,6
2.	M. kedelai	25,1	23,8	23,4	23,2
3.	M. kanola (<i>rape seed</i>)	14,3	14,3	13,1	14,3
4.	M. bunga matahari	11,8	11,7	13,1	11,1
5.	M. lainnya*	26,9	25,4	23,9	23,8
II.	Total Konsumsi (000 ton)	90.501	104.281	118.061	132.234
	Pangsa (%)				
1.	M. sawit (CPO)	17,0	19,2	21,4	22,5
2.	M. kedelai	19,7	19,3	18,9	19,0
3.	M. kanola (<i>rape seed</i>)	11,1	11,3	11,5	11,7
4.	M. bunga matahari	9,2	9,2	9,2	9,1
5.	M. lainnya*	43,0	41,0	39,0	37,7

*) Minyak kapas, m. kacang tanah, m. kelapa, m. sesame, m. jagung, m. olive, m.i.sawit

Sumber: Diolah dari Oil World berbagai tahun

Jika ditinjau untuk masing-masing komoditas diperoleh gambaran bahwa pertumbuhan konsumsi yang cukup tinggi terjadi terutama pada tiga jenis minyak nabati yaitu minyak kedelai, minyak kelapa sawit dan minyak kanola. Namun demikian mulai periode 2003-2007 pangsa konsumsi minyak kelapa sawit mengungguli pangsa konsumsi minyak kedelai. Kondisi tersebut diperkirakan masih akan terus berlanjut hingga tahun 2020.

Dari segi daya saing, minyak kelapa sawit ternyata cukup kompetitif dibanding minyak nabati lainnya, karena produktivitas per hektar cukup tinggi, merupakan tanaman tahunan yang cukup handal terhadap berbagai perubahan agroklimat dan ditinjau aspek gizi minyak kelapa sawit tidak terbukti sebagai penyebab meningkatnya kadar kolesterol, bahkan mengandung beta karoten sebagai pro-vitamin A. Berdasarkan studi oleh Asian Development Bank (1993) Indonesia memiliki tingkat daya saing yang lebih tinggi dibanding Malaysia dan PNG dalam memproduksi minyak sawit (CPO).

Perkembangan yang signifikan penggunaan bahan bakar bio pada akhir-akhir ini, menjadikan perkelapa-sawitan sebagai salah satu sumber minyak nabati untuk menghasilkan bahan bakar bio tersebut, menjadi lebih prospektif. Laporan terakhir penggunaan bahan bakar biodiesel di Eropa, Amerika, dan Kanada telah mencapai jutaan ton dan kecenderungannya akan terus

meningkat. Kecenderungan peningkatan ini dimungkinkan karena semakin besarnya tuntutan terhadap eliminasi efek rumah kaca (*green house effect*) di berbagai belahan dunia. Di samping itu, disadari bahwa sumber-sumber bahan bakar yang tidak terbarukan (fosil alam) semakin menipis dan mengharuskan dikembangkannya bahan bakar dari sumber-sumber yang terbarukan, dan CPO sebagai salah satu produk minyak nabati berpotensi besar sebagai bahan baku biodiesel.

Perkembangan juga menunjukkan bahwa dari CPO dapat diderivasi produk-produk penting seperti antara lain sumber beta karoten dan vitamin E serta banyak produk-produk lanjutan lainnya.

Hal ini semua menggambarkan bahwa prospek perkelapa-sawitan Indonesia cukup menjanjikan dan tentu saja upaya lebih lanjut untuk meningkatkan konsumsi/permintaan CPO perlu intensifkan baik secara nasional dan internasional.

Tabel 9 menunjukkan bahwa pertumbuhan luas lahan rata-rata 4,3% per tahun, produksi 5,9% per tahun, permintaan dalam negeri 12,9% dan ekspor 32,3% per tahun sepanjang tahun 1984 sampai tahun 2000. Pertumbuhan produksi dan permintaan minyak kelapa sawit tidak seimbang, ketidakseimbangan disebabkan perkembangan luas lahan relatif rendah dibandingkan pertumbuhan pasar dalam artian permintaan minyak kelapa sawit secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan yang menarik pada industri minyak sawit di masa mendatang adalah semakin rumitnya pemasaran karena kenaikan produksi.

Karena itu diperlukan upaya peningkatan daya serap pasar melalui modifikasi teknologi yang dapat memperluas kegunaan minyak sawit serta menetapkan arah usaha kelapa sawit yang efisien untuk menjamin kestabilan harga di masa mendatang.

Secara lebih terperinci permasalahan studi ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah bentuk struktur pasar CPO Sumatera Utara? Apakah lahan kelapa sawit Sumatera Utara sebagai salah satu pilar

dalam pengembangan ekonomi wilayah dipengaruhi oleh ekspor CPO, permintaan domestik CPO, harga ekspor CPO, harga domestik CPO (sebagai indikator pasar CPO)?

Tujuan umum studi ini adalah untuk mengetahui perkembangan pasar CPO Sumatera Utara. Tujuan khusus studi adalah: untuk mengetahui bentuk struktur pasar CPO Sumatera Utara. Mengkaji pengaruh pasar CPO terhadap pengembangan ekonomi wilayah di Sumatera Utara (luas lahan kelapa sawit). Hipotesis: terdapat pengaruh pasar CPO (ekspor dan domestik), harga CPO (ekspor dan domestik) terhadap pengembangan ekonomi wilayah (luas lahan kelapa sawit).

Tabel 9. Luas Lahan Kelapa Sawit, Produksi CPO Permintaan Dalam Negeri dan Luar Negeri CPO Sumatera Utara 1980-2000

Tahun	Luas Lahan (ribu hektar)	(%)	Produksi (ribu ton)	(%)	Permintaan Dalam Negeri (ribu ton)	(%)	Permintaan Luar Negeri (ribu ton)	(%)
1984	388,8	-	1.003,9	-	834,8	-	162,3	-
1985	393,4	1,2	1.027,2	2,3	408,9	-51,0	609,2	275,4
1986	392,5	-0,2	1.237,8	20,5	731,6	78,9	504,5	-17,2
1987	388,5	-1,0	1.124,5	-9,2	662,7	-9,4	452,0	-10,4
1988	420,8	8,3	1.314,8	16,9	686,8	3,6	633,7	40,2
1989	472,1	12,2	1.382,1	5,1	710,2	3,4	624,3	-1,5
1990	513,2	8,7	1.658,9	20,0	1.111,3	56,5	567,9	-9,0
1991	508,4	-0,9	1.688,7	1,8	931,1	-16,2	779,5	37,2
1992	521,1	2,5	1.826,3	8,1	1.165,5	25,2	647,1	-16,9
1993	554,4	6,4	1.861,6	1,9	932,6	-20,0	954,9	47,6
1994	602,2	8,6	1.807,7	-2,9	780,1	-16,4	1.027,5	7,6
1995	626,2	4,0	1.829,2	1,2	760,1	-2,6	1.004,0	-32,2
1996	649,4	3,7	1.864,9	2,0	944,9	24,3	986,0	-1,8
1997	693,0	6,7	2.017,2	8,2	564,1	-40,3	1.448,0	46,9
1998	715,6	3,3	2.504,0	24,1	2.059,0	265,0	404,0	-72,1
1999	732,1	2,3	2.313,0	-7,6	1.417,8	-31,1	866,0	114,4
2000	755,5	3,2	2.363,0	2,2	537,0	-62,1	1.808,0	108,8
Rata-rata		4,3		5,9		12,9		32,3

Sumber: Berbagai sumber diolah

Catatan: % adalah pertumbuhan

Kerangka konseptual



Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual Pengaruh Pasar CPO terhadap Pengembangan Ekonomi Wilayah

METODE

Penelitian ini difokuskan pada pengaruh pasar yakni permintaan domestik CPO, ekspor CPO, harga domestik CPO dan harga ekspor CPO terhadap pengembangan ekonomi wilayah yang identik sebagai luas lahan kelapa sawit di Sumatera Utara. Subyek penelitian ini adalah keseluruhan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. Obyek penelitian ini adalah luas lahan kelapa sawit Sumatera Utara sebagai indikator pilar pada pengembangan ekonomi wilayah perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data runtun waktu (*time series*) selama kurun waktu 1984-2003. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Dinas perkebunan Sumatera Utara, Balai Perkebunan Kelapa Sawit Medan, Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Sumatera Utara, Porla Malaysia, IMF, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Oil World, ICBS Jakarta. Untuk menjawab masalah pertama menggunakan analisis deskriptif dengan dasar konsep struktur pasar.

Untuk menjawab masalah kedua menggunakan analisis regresi berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Untuk

itu fungsi-fungsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$LL = f(PDOM, EKS, HD\$, HEKS) \dots\dots\dots(1)$$

Dari persamaan 1, kemudian dispesifikasikan kedalam model sebagai berikut:

$$LL_t = A_0 + A_1 PDOM_t + A_2 EKS_t + A_3 HD\$_t + A_4 HEKS_t + U_{1t} \dots\dots\dots(2)$$

Selanjutnya persamaan 2 ditransformasikan ke dalam persamaan linear sehingga menjadi:

$$\ln LL_t = A_0 + A_1 \ln PDOM_t + A_2 \ln EKS_t + A_3 \ln HD\$_t + A_4 \ln HEKS_t + U_{1t} \dots\dots\dots(3)$$

Di mana:

- LL = Luas lahan kelapa sawit Sumut (hektar)
- PDOM = Permintaan dalam negeri cpo Sumut (ton)
- EKS = Ekspor cpo Sumut (ton)
- HD\$ = Harga domestik CPO Sumut (Rp/US\$)
- HEKS = Harga ekspor cpo Sumut (US\$)
- A₀ = Konstanta
- A₁...A₄ = Koefisien regresi
- U₁ = Variabel gangguan (error term)

HASIL

Jenis tanah di Sumatera Utara didominasi oleh tanah litosol, podsolik dan regosol, yaitu seluas 1.601.601 ha atau sekitar 22.34% dari luas total Sumatera Utara yang tersebar di Kabupaten Asahan, Dairi, Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu, Langkat, Nias, dan Tapanuli Selatan. Tanah ini sesuai untuk pengembangan komoditi perkebunan seperti karet, kelapa sawit dan tanaman keras lainnya. Jenis tanah lain yang banyak dijumpai adalah padosolik merah kuning (16,35%), hidromorfik kelabu, humus, dan regosol (11,54%).

Propinsi Sumatera Utara pada tahun 1998 tercatat pemanfaatan lahan didominasi kegiatan pertanian seluas 33.067,77 km atau sekitar 46,13% dan kegiatan pertanian terbesar berada di wilayah pantai timur, yaitu meliputi areal seluas lebih kurang 57% dari luas areal pertanian Sumatera Utara.

Luas lahan kelapa sawit Sumatera Utara mengalami perkembangan rata-rata sebesar 4.36 persen per tahun selama periode tahun 1984-2003. Yakni dari 388.800 hektar pada tahun 1984 menjadi sebesar 896.230 hektar

tahun 2003. Pada tahun 2001 terjadi kenaikan sebesar 15,04% terhadap luas lahan di Sumatera Utara, ini disebabkan banyaknya permintaan dari luar negeri dengan banyak ditemukannya produk-produk turunan dari CPO di antaranya untuk bahan baku kosmetik, bahan bakar, dan lain-lain, seperti pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Luas Lahan Kelapa Sawit Sumatera Utara 1984 – 2003 (hektar)

Tahun	Hektar	% Pertumbuhan
1984	388.800	
1985	393.400	1,18
1986	392.500	-0,23
1987	388.500	-1,02
1988	420.800	8,32
1989	472.100	12,20
1990	513.200	8,71
1991	508.400	-0,94
1992	521.100	2,50
1993	554.400	6,39
1994	600.200	8,26
1995	622.200	3,66
1996	649.400	4,38
1997	693.000	6,72
1998	715.600	3,27
1999	732.100	2,31
2000	755.500	3,20
2001	869.070	15,04
2002	886.610	2,02
2003	896.230	1,09
Rata-rata		4,35

Sumber: Data Statistik Perkebunan Sumatera Utara Tahun 1980–2003. Dinas Perkebunan Propinsi Sumut, Medan.

Produksi minyak kepala sawit (CPO) mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,37 persen per tahun selama periode tahun 1984–2003. Pada tahun 1984 produksi sebesar 1003,90 ribu ton meningkat menjadi 2.537,96 ribu ton pada tahun 2003. Luas lahan kelapa sawit mulai tahun 1993 sampai

dengan tahun 1998 terus meningkat sehingga pada tahun 1998 tanaman kelapa sawit sudah mulai menghasilkan sehingga pada tahun 1998 produksi minyak kelapa sawit mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 24,14%, seperti pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Produksi Minyak Kelapa Sawit (CPO) Sumatera Utara 1984-2003

Tahun	Produksi CPO (ribu ton)	% Pertumbuhan
1984	1.003,90	
1985	1.027,20	2,32
1986	1.237,80	20,51
1987	1.124,50	-9,16
1988	1.314,80	16,93
1989	1.382,10	5,12
1990	1.658,90	20,03
1991	1.688,70	1,80
1992	1.826,30	8,15
1993	1.861,60	1,94
1994	1.807,70	-2,90
1995	1.829,20	1,19
1996	1.864,90	1,96
1997	2.017,20	8,17
1998	2.541,00	24,14
1999	2.313,00	-7,63
2000	2.363,00	2,17
2001	2.467,60	4,43
2002	2.555,89	3,58
2003	2.537,96	0,71
Rata-rata		5,37

Sumber: Data Statistik Perkebunan Sumatera Utara Tahun 1980 – 2003. Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara, Medan.

Permintaan dalam negeri minyak kelapa sawit Sumatera Utara mengalami peningkatan rata-rata sebesar 14.24 persen selama periode tahun 1983–2003. Pada tahun 1984 permintaan dalam negeri sebesar 834,80 ton meningkat menjadi 1.545 ton. Pada tahun 1997 dan tahun 1998 terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia mengakibatkan permintaan CPO di dalam negeri sangat tinggi sehingga pemerintah mengambil kebijakan mengurangi kuota ekspor, seperti pada tabel berikut.

Tabel 12. Permintaan Dalam Negeri Minyak Kelapa Sawit (CPO) Sumatera Utara 1984 – 2003

Tahun	Permintaan Dalam Negeri CPO (ton)	% Pertumbuhan
1984	834,80	
1985	408,90	-51,02
1986	731,60	78,92
1987	662,70	-9,42
1988	686,80	3,64
1989	710,20	3,41
1990	1.111,30	56,48
1991	931,10	-16,22
1992	1.165,50	25,18
1993	932,60	-19,99
1994	780,10	16,36
1995	760,10	-2,57
1996	944,90	24,32
1997	564,10	-40,30
1998	2.059,00	265,01
1999	1.417,80	-31,15
2000	1.626,50	-0,15
2001	1.656,00	1,82
2002	1.255,40	-24,19
2003	1.545,00	23,07
Rata-rata		14,24

Sumber: Data Statistik Perkebunan Sumatera Utara Tahun 1980–2003. Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara, Medan. Diolah.

Ekspor minyak kelapa sawit (CPO) mengalami peningkatan rata-rata sebesar 24 persen per tahun selama periode tahun 1984-2003. Pada tahun 1984 ekspor sebesar 162.30 ribu ton meningkat menjadi 727.60 ribu ton pada tahun 2003.

Penurunan ekspor pada tahun 1986-1987 disebabkan kebijaksanaan asam lemak bebas dari Amerika Serikat, sehingga permintaan importir dari Amerika menurun drastis. Akhirnya pihak produsen CPO di Indonesia melakukan kloning baru untuk menemukan bibit yang menghasilkan asam lemak bebas yang rendah. Pada tahun 1998 terjadi penurunan yang drastis terhadap ekspor CPO disebabkan kebijakan pemerintah yang melarang 9 produsen CPO di Indonesia untuk mengekspor CPO-nya guna memenuhi kebutuhan dalam negeri akan minyak goreng dan pada tahun 1999 pemerintah telah

mencabut larangan ekspor kepada 9 produsen CPO di Indonesia, sehingga pada tahun 1999 terjadi kenaikan ekspor yang cukup signifikan sebesar 114,36%, seperti pada Tabel berikut.

Tabel 13. Ekspor Minyak Kelapa Sawit Sumatera Utara 1984–2003

Tahun	Ekspor (ribu ton)	%
1984	162,30	
1985	609,20	275,36
1986	504,50	-17,19
1987	452,00	-10,41
1988	633,70	40,20
1989	624,30	-1,49
1990	567,90	-9,04
1991	779,50	37,26
1992	647,10	-16,99
1993	954,90	47,57
1994	1.027,50	7,61
1995	1.004,00	-2,29
1996	986,00	-1,80
1997	1.448,00	46,86
1998	404,00	-72,10
1999	866,00	114,36
2000	553,62	-36,08
2001	624,08	12,73
2002	1.089,92	74,65
2003	727,60	-33,25
Rata-rata		24,00

Sumber: Data Statistik Perkebunan Sumatera Utara Tahun 1980–2003. Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara, Medan.

PEMBAHASAN

Struktur Pasar CPO

Ditinjau dari sisi produsen (penjual) CPO terdapat beberapa produksi di negara-negara tertentu seperti Malaysia, Indonesia, Nigeria, Columbia, Thailand, dan lainnya ini didukung oleh kondisi lahan perkebunan yang sesuai (cocok) untuk budidaya tanaman komoditi kelapa sawit.

Ditinjau dari sisi konsumen (pembeli) CPO, terbatas pada negara-negara yang memproduksi produk-produk turunan dari CPO seperti minyak goreng, kosmetika, sabun, dan lain-lain, di antaranya negara-negara Amerika Serikat, China, Eropa, Rusia, dan lain-lain (Gapki 2004: 7).

Tabel 14. Perbandingan Jumlah Pabrik Kelapa Sawit dengan Pabrik Produk Turunan CPO di Sumatera Utara Tahun 1999

	(unit)
Pabrik Minyak Kelapa Sawit (CPO)	92
Pabrik Minyak Goreng	24
Pabrik Oleo Chemical	10
Pabrik Sabun	72
Pabrik Margarine	

Sumber: ICBS, Inc tahun 2000, Disperindag Sumatera Utara (diolah)

Tabel 14 menunjukkan bahwa jumlah pabrik yang mengolah produk turunan CPO di Sumatera Utara sebagai konsumen CPO, jauh lebih sedikit jumlahnya dari pada pabrik minyak kelapa sawit sebagai produsen CPO sehingga keadaan tersebut dapat didefinisikan sebagai pasar *Olygopsoni* (banyak produsen sedikit konsumen).

Pengaruh Pasar terhadap Lahan Sawit Permintaan Ekspor

Tabel 15 menunjukkan bahwa ekspor memberikan pengaruh yang signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap luas lahan kelapa sawit, nilai t_{-stat} lebih besar dari $t_{-tab(4;20)}$ ($t_{-stat} > t_{-tab}$). Koefisien regresi 0,27 pada permintaan ekspor, artinya secara statistik setiap peningkatan permintaan ekspor CPO 10% akan direspons dengan peningkatan luas lahan kelapa sawit sebesar 27% (*ceteris paribus*). Ini dapat terjadi karena minyak kelapa sawit CPO salah satu produk hasil perkebunan yang pemasarannya lebih dititik-beratkan pada pasar internasional karena pasar internasional memiliki industri-industri produk turunan CPO yang banyak.

Pembangunan subsektor perkebunan khususnya kelapa sawit merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan pertanian serta merupakan bagian integral pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, (a) kelapa sawit merupakan penggerak utama (*prime mover*) pengembangan agribisnis kelapa sawit mulai dari hulu hingga ke hilir (Saragih, 1998), (b)

pembangunan subsektor kelapa sawit merupakan penyedia lapangan kerja yang cukup besar dan sebagai sumber pendapatan petani; (c) kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang memiliki andil besar dalam menghasilkan devisa negara.

Tabel 15. Hasil Estimasi Luas Lahan Kelapa Sawit

Variabel	Model		Significant (p)
	Koefisien Regresi	t _{-hitung}	
Konstanta	-0,870	-0,872	0,397
Permintaan Ekspor	0,270	6,232**	0,000
Permintaan Domestik	0,0002	0,005	0,996
Harga Ekspor	0,416	2,545**	0,022
Harga Domestik	0,392	10,462**	0,000
t _{-tabel}	1,753		
F _{-tabel}	3,06		
R ²	= 0,927		
F _{-hitung}	= 47,546		
D/W	= 1,970		

** = Signifikan pada pengujian $\alpha = 5\%$

Permintaan Domestik

Tabel 15 menunjukkan bahwa Permintaan Domestik memberikan pengaruh yang tidak signifikan pada pengujian $\alpha = 5\%$ terhadap luas lahan kelapa sawit, di mana nilai t_{-stat} lebih kecil dari $t_{-tab(4;20)}$ ($t_{-stat} > t_{-tab}$). Koefisien regresi 0,0002 pada variabel permintaan ekspor, artinya secara statistik setiap peningkatan permintaan domestik kelapa sawit akan meningkatkan produksi kelapa sawit (*ceteris paribus*). Hal ini dapat terjadi karena berkembangnya industri produk turunan dari CPO di dalam negeri mulai berkembang.

Harga Ekspor

Harga ekspor memberikan pengaruh yang signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap luas lahan kelapa sawit, di mana nilai t_{-stat} lebih besar dari $t_{-tab(4;20)}$ ($t_{-stat} > t_{-tab}$). Koefisien regresi 0,42 pada variabel harga domestik, artinya secara statistik setiap peningkatan harga ekspor CPO sebesar 10% akan direspons dengan meningkatkan luas lahan kelapa sawit sebesar 4,2% (*ceteris paribus*).

Nilai ekspor minyak sawit Indonesia ditentukan oleh volume ekspor dan harga minyak sawit di pasar internasional. Fluktuasi harga di pasar domestik tidak terlepas dari pengaruh tingkat produksi minyak sawit, kebijakan stok dan tingkat konsumsi minyak sawit dunia. Perubahan permintaan minyak sawit di pasar internasional akan mempengaruhi struktur harga, kemudian perubahan harga minyak sawit dunia akan mempengaruhi produksi maupun penawaran ekspor minyak sawit Indonesia.

Harga Domestik

Harga domestik memberikan pengaruh yang signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap luas lahan kelapa sawit, di mana nilai t_{stat} lebih besar dari $t_{\text{tab}(4;20)}$ ($t_{\text{stat}} > t_{\text{tab}}$). Koefisien regresi 0,39 pada harga domestik, memberi arti bahwa secara statistik setiap peningkatan harga domestik CPO sebesar 10% akan direspons dengan meningkatkan luas lahan kelapa sawit sebesar 3,92% (*ceteris paribus*). Ini dapat terjadi karena berkembangnya industri produk turunan CPO di dalam negeri, adanya kebijakan pemerintah mengenai kuota ekspor sejak tahun 1978 dan kebijaksanaan pemerintah menggantikan kopra kepada kelapa sawit untuk bahan baku minyak goreng domestik.

Sejalan dengan temuan Afifuddin (2002) bahwa, ada signal pasar domestik CPO, berarti memberi implikasi positif terhadap pengembangan ekonomi pada wilayah barat ini. Industri produk turunan Indonesia mulai merangkak menyongsong ekonomi domestik yang berorientasi global.

Studi Purba (2003), yang menyimpulkan bahwa areal kelapa sawit perkebunan swasta di Sumatera Bagian Utara tidak responsif terhadap perubahan harga. Jika harga CPO berubah 1%, maka luas areal akan berkurang 0.417% dalam jangka pendek dan 0.913% dalam jangka panjang. Faktor peubah tersebut tidak responsif dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Keadaan ini mengindikasikan bahwa perluasan areal kelapa sawit perkebunan swasta di wilayah Sumatera Bagian Utara telah mendekati batas jenuh.

Hasil studi pada Tabel 15 menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas dapat menjelaskan variasi perubahan yang terjadi

pada variabel luas lahan kelapa sawit sebesar 0,907 (90,7%). Berdasarkan nilai F_{Hitung} sebesar 47,546 $>$ F_{tabel} sebesar 3,06. Menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap luas lahan kelapa sawit di Sumatera Utara.

Pengaruh Pasar CPO terhadap Pengembangan Ekonomi Wilayah

Pasar CPO dalam studi ini adalah identik dengan permintaan dalam negeri CPO, ekspor CPO, harga domestik CPO, dan harga ekspor CPO. Dan pengembangan ekonomi wilayah adalah luas lahan kelapa sawit. Secara keseluruhan mempengaruhi pengembangan ekonomi wilayah.

Di sisi lain permintaan domestik CPO tidak signifikan terhadap luas lahan, ini terjadi disebabkan industri produk turunan baru mulai berkembang secara perlahan, karena investasi yang mahal dan proses yang panjang bagi pendiriannya. Pasar CPO dari sudut permintaan dalam negeri memiliki kenaikan sebesar rata-rata 14,24% sepanjang periode tahun 1984 sampai dengan tahun 2003. ekspor rata-rata sebesar 24 persen per tahun sepanjang periode tahun 1984 sampai dengan tahun 2003.

Pemenuhan permintaan pasar ini telah direspons dengan pengembangan ekonomi wilayah baik dari sisi luas lahan terdapat trend yang meningkat sebesar rata-rata 4,40 persen per tahun sepanjang periode 1984 sampai dengan 2003, dan dari sisi produksi CPO mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,4% per tahun sepanjang periode yang sama.

Selanjutnya kondisi di atas, memberikan stimulus kepada petani kelapa sawit dan produsen CPO untuk meningkatkan produksi dan kualitas agar dapat lebih diterima di pasar internasional dan merangsang para investor untuk menanamkan modalnya di bidang produk turunan dari CPO di dalam negeri sebagai salah satu indikator terjadinya pengembangan ekonomi wilayah di Sumatera Utara.

KESIMPULAN

Struktur pasar CPO di Sumatera Utara berbentuk *oligopsoni*, yaitu pasar CPO di mana kelompok pedagang besar yang mendominasi perdagangan CPO. Di mana

posisi mereka telah mengintegrasikan dirinya secara vertikal baik pada pada pemasaran produknya maupun di industri pengolahannya, sampai ke perkebunannya.

Pasar ekspor, harga ekspor dan harga domestik berpengaruh secara nyata terhadap pengembangan ekonomi wilayah (luas lahan kelapa sawit), namun pasar domestik tidak berpengaruh secara nyata terhadap luas lahan.

SARAN

Beberapa kebijakan perlu dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pihak produsen CPO dan pekebun kelapa sawit untuk meningkatkan respons importir terhadap CPO dan investasi terhadap pabrik kelapa sawit maupun pengembangan lahan kelapa sawit, melalui peningkatan kualitas CPO agar dapat bersaing dengan komoditi minyak nabati lain di pasar internasional dengan memperhatikan kualitas panen dan *quality control* yang baik serta inovasi lain.

Pemerintah Propinsi Sumatera Utara diharapkan memberikan kemudahan-kemudahan dengan memperhatikan minat investor agribisnis yang berkehendak menggalakkan investasi di bidang *down stream* dari kelapa sawit di Sumatera Utara dengan mengajak investor lokal maupun asing untuk membangun pabrik-pabrik produk turunan dari CPO di Sumatera Utara dengan tidak mempersulit dalam hal perizinan. Sehingga penanganan investasi pada bidang pengolahan produk turunan CPO dipandang perlu untuk segera dimulai. Dengan banyaknya pabrik produk turunan CPO di Sumatera Utara akan berdampak kepada penyerapan tenaga kerja, PAD, GDP Sumatera Utara dan kesejahteraan masyarakat.

Strategi pemasaran yang profesional sangat mendukung keberhasilan pemasaran CPO di pasar internasional melalui kerjasama dengan pihak konsumen luar negeri atau importir, perdagangan barter atau imbal dagang antara CPO dengan barang lain konsumen luar negeri.

Bagi pengembangan penelitian lanjutan perlu mengkaji pengembangan produk turunan CPO ditinjau dari sisi pasar dan kapasitas pabrik produk turunan CPO untuk mendukung peningkatan produksi CPO di Sumatera Utara.

DAFTAR RUJUKAN

- Afifuddin, Sya'ad, *et al.*, 1994, An Econometric Analysis of the Indonesian Palm Oil Industry, *The International Journal of Oil Palm Reseach and Development*, ELAEIS, Volume 6 No. 1 June Malaysia.
- Afifuddin, Sya'ad, *et al.*, 2002, *Pengaruh Faktor Permintaan Dalam Negeri dan Luar Negeri Minyak Kelapa Sawit terhadap Luas Lahan Kelapa Sawit di Sumatera Utara*. Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Badan Perencana Daerah Sumatera Utara, 2001, *Marter Plan dan Action Plan Kawasan Sentra Produksi Pertanian Propinsi Sumatera Utara*, Laporan Akhir, Bapeda Sumatera Utara, Medan.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, 1970–2004, *Indikator Ekonomi*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 1970–2004, *Indikator Ekonomi*, Medan.
- Badan Pusat Statistik, 1980–2004, *Statistik Indonesia*, Jakarta.
- Balai Penelitian Perkebunan Medan, 1970–1988, *Statistik Sawit*, Medan.
- Bank Indonesia, 1970–2004, *Laporan Tahunan*, Jakarta.
- Gujarati, Damodar, 1993. *Ekonometrika Dasar*, Alih bahasa: Sumarno Zain. Erlangga, Jakarta.
- Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara, 1980–2004, *Data Statistik Perkebunan Sumatera Utara*, Medan.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara, 2002, *Data Statistik Industri Sabun di Sumatera Utara*, Medan.
- International Contact Business System (ICBS), 1997, *Studi tentang Perkebunan dan Pemasaran Minyak Kelapa Sawit Indonesia*, Jakarta.

- Khera, H.S., 1976. *The Oil Palm Industry of Malaysia*, University of Malaya Kuala Lumpur.
- Nerlove, M. 1956, "Estimates of the Elasticities of Supply of the Selected Agricultural Commodities", *Journal of Farm Economics* 38: 496 – 549.
- Nerlove, M, 1958, *The Dynamics of Supply: Estimation of Farmers Response to Price*. Baltimore, Md. Johns Hopkins University Press.
- Papas James dan Mark Hirschey, 1995, *Ekonomi Manajerial*, Edisi Keenam, Jilid I, Alih Bahasa: Daniel Wirajaya, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Purba, Jan Horas, 2003. *Model Ekonometrika Kelapa Sawit Indonesia, Analisis Simulasi Kebijakan Internal dan Eksternal*, Jurnal Kopertis Wilayah 4, 2001. 12 Maret 2003. (<http://www.kopertis4.tripod.com>)
- Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), 1999, *Buku Saku Statistik Kelapa Sawit*, Medan.
- Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), 1974-1988. *Statistik Sawit*, Sumatera Utara Medan.
- Saragih, B, 1998. *Mengembangkan Industri Hilir Berbasis Minyak*. Semai, Bogor.

MENGANTISIPASI BANJIR BESAR KOTA MEDAN

Bachtiar Hassan Miraza

Profesor dan Ketua Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana USU. E-mail: bachtiar@indosat.net.id

***Abstract:** Flood is recently a continuous disaster in every part of Indonesia particularly in urban area. Such disaster occurs because the lack of planning and controlling of urban natural resources. The municipality of Medan needs a serious development on urban facilities and infrastructure in reducing flood. It is calculated that the natural resource of Medan is over utilize and there is no commitment of the local government and the citizen on environmental protection.*

***Keywords:** planning, utilization and controlling*

PENDAHULUAN

Beda tsunami Aceh (2005) dengan banjir besar Jakarta (2007). Tsunami Aceh adalah fenomena alam sementara banjir besar Jakarta adalah akibat perbuatan manusia terhadap alam. Perilaku manusia di dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berjalan tanpa suatu perencanaan dan pengendalian ataupun tidak didasarkan pada daya dukung alam itu sendiri menjadi sebab kerusakan alam sekitarnya yang membawa malapetaka terhadap kehidupan warga Jakarta. Keadaan seperti ini bisa saja terjadi di mana pun jika suatu daerah memperlakukan sumber daya alam seperti yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Walaupun banjir besar Jakarta karena fenomena alam juga (musim) tapi hendaknya hal ini tidak dijadikan alasan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta atas pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Apa yang dikatakan sebagai akibat musim namun perilaku manusia lebih kuat sebagai sebab timbulnya banjir tersebut. Akibat yang ditimbulkan oleh musim akan dapat diperkecil atau ditiadakan sama sekali jika fungsi perencanaan dan pengendalian dapat berjalan secara sempurna. Di Jakarta hal inilah yang diprediksi sebagai sebab timbulnya masalah banjir. Tekanan terhadap sumber daya alam sedemikian beratnya karena pemanfaatannya berjalan di atas daya dukung alam karena tiadanya suatu rencana yang efektif.

Keadaan seperti banjir besar Jakarta tidak saja berlaku untuk daerah perkotaan tetapi bisa juga berlaku untuk daerah nonkota yang sumber daya alamnya di eksploitasi secara sembarangan. Pemanfaatan hutan dan lahan secara tidak terencana menyebabkan

daerah nonkota mengalami banjir seperti banyak terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Di saat manusia lupa bahwa kehidupannya bergantung pada alam dan pada saat itu ia melakukan pengurusan secara sembarangan terhadap sumber daya alam disitulah bencana mulai berjalan. Padahal tanpa alam tidak ada yang dapat dilakukan di dalam kehidupan. Memang alam harus dikuasai bagi kehidupan manusia. Jika tidak maka terjadi kemubaziran dan menyimpang dari hukum kehidupan yang berjalan. Namun semuanya itu harus melalui suatu proses yang benar. Alam adalah sumber kehidupan yang harus dijaga kelestariannya agar pemanfaatannya dapat berkesinambungan.

Kejadian banjir besar Jakarta awal tahun 2007 bukanlah secara tiba-tiba. Ia telah berproses beberapa lama sebelumnya dan alampun telah memberikan sinyal bahwa ia sudah tidak mampu lagi memikul beban yang terlalu berat dari perilaku masyarakat kota Jakarta. Beberapa kejadian banjir kecil sebelum banjir besar, tercemarnya air tanah, berjangkitnya penyakit menular di antara warga, gangguan kenyamanan hidup antar warga adalah sinyal yang sudah diberikan sumber daya alam Jakarta sebelumnya. Namun masyarakat Jakarta tidak memperdulikannya. Eksploitasi atas sumber daya alam terus berjalan. Dalam hal ini manusia lupa bahwa daya dukung alam juga mempunyai batas-batas yang harus diperhatikan.

HASIL

Dapat dipahami eksploitasi alam daerah perkotaan disebabkan oleh dua sebab pokok di samping faktor-faktor lainnya. *Pertama* terjadinya ekspansi ekonomi yang membutuhkan lokasi industri dan perdagangan sehingga

melanggar daerah hijau yang sebenarnya dilarang untuk disentuh. Tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan kawasan industri tanpa memperhatikan daya dukung alam dan tanpa pengendalian yang sempurna membikin kondisi alam semakin kacau, yang sudah pasti akan berproses menjadi sebuah bencana. Pemanfaatan sumber daya alam tidak pula diikuti dengan keseimbangan pembangunan infrastruktur kota ataupun perencanaan ruang yang berimbang dan efektif. Fungsi perencanaan dan pengawasan dari pemerintah kota menjadi mandul dikala pemikirannya lebih memperhatikan perkembangan ekonomi jangka pendek daripada kehidupan warga jangka panjang. Nilai ekonomi jangka pendek lebih diutamakan daripada kesinambungan manfaat jangka panjang. Daya dukung alam dan kelestarian lingkungan serta kehidupan yang berkelanjutan hapus dari pemikiran mereka. Mereka menganggap pembangunan ekonomi sebagai sebuah paket yang tidak terkait dengan kegiatan lainnya. Dari anggapan ini mereka menyimpulkan bahwa paket ini lebih penting daripada memikirkan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Pemikiran yang keliru ini membawa mereka kepada suatu tindakan yang membawa petaka pada kehidupan warga.

Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian yang merupakan konsep dasar atas pengaturan sumber daya alam secara total tidak berjalan walau di atas kertas biru hal itu dituliskan. Lain yang direncanakan lain yang berjalan dalam aktivitas kota. Kefanatan atas pentingnya pembangunan ekonomi dan berpikir untuk kepentingan jangka pendek serta terbatasnya pengetahuan mereka terhadap alam sebagai penyebab utama munculnya berbagai kekeliruan dalam membuat kebijakan dan pelaksanaan tata ruang kota. Pemanfaatan sumber daya alam kota lebih diutamakan daripada perencanaan dan pengendaliannya. Tata ruang kota dimanfaatkan sedemikian hebatnya dan menggambarkan kemewahan kota yang luar biasa tapi dengan ancaman alam yang cukup tinggi pula. Di kala ancaman itu muncul menjadi kenyataan maka kerugian yang ditimbulkannya mungkin lebih besar daripada nilai ekonomi yang diterima oleh warga.

Kota sebagai tempat harapan hidup sebagian besar masyarakat karena kota tempat segala aktivitas masyarakat berlangsung. Persaingan antar sesama warga dalam

kehidupan cukup kuat. Sumber daya alam kota yang terbatas menjadi rebutan dan berbagai cara dilakukan untuk memilikinya, yang semuanya berakhir dengan kehancuran alam. Kerugian tidak saja berbentuk materi tetapi juga yang bersifat nonmateri seperti kesehatan, pendidikan dan kenyamanan serta jasa lainnya seperti arus jasa transportasi dan jasa perdagangan serta tekanan jiwa.

Kita tentu tidak menghendaki terganggunya hubungan manusia dengan alam. Bahkan Tuhan sekalipun tidak menghendaki terjadinya gangguan ini. Oleh sebab itu manusia harus dapat menempatkan diri dengan mempelajari hukum alam yang bersumber dari hukum Tuhan. Hubungan manusia dengan alam seperti yang diajarkan agama hampir tidak dipedomani lagi di dalam membangun sebuah kota seperti Jakarta. Padahal itu adalah sebuah ilmu yang patut dipedomani. Banyak orang yang berilmu tapi sedikit orang yang mampu dan mau mengimplementasikannya. Kita telah berbuat seenaknya terhadap alam tanpa mau memikirkan kondisi alam itu sendiri. Alam dieksploitir sebesar besarnya melebihi daya dukungnya. Alam dan manusia adalah dua sisi yang harus dijaga keseimbangannya. Dan keseimbangan inilah yang selama ini diabaikan manusia.

Kedua, disebabkan oleh arus urbanisasi yang deras. Ini menyangkut pada tidak terjadinya keseimbangan pembangunan antara kota dengan desa. Perkembangan kota berjalan sangat cepat sementara perkembangan desa hampir tidak ada. Bahkan pertumbuhan manusia yang cepat menghilangkan kesempatan bagi banyak orang di desa untuk bertani dan berkebun karena lahan yang tersedia di desa adalah terbatas. Dikala hal seperti ini terjadi masyarakat desa akan menyabung nyawa ke kota sehingga arus urbanisasi berjalan sangat deras. Mereka melihat kota sebagai daerah harapan hidup yang menjanjikan dengan penuh kemewahan. Kebutuhan akan tenaga kerja di kota juga sebagai daya tarik kehadiran migran ini. Mereka datang dengan modal nol dan mereka tinggal di mana saja dan menempati daerah-daerah yang sebenarnya tidak diizinkan sebagai daerah pemukiman. Di kala desa yang mereka tempati sudah tidak dapat lagi membekali kehidupan yang layak bagi mereka, tidak ada jalan lain terkecuali menyambung nasib di daerah perkotaan.

Di pihak lain pemerintah kota tidak berdaya menyiapkan pemukiman para migran dan tidak berdaya untuk mengawasi penggunaan daerah terlarang dan tidak berdaya di dalam mengatasi masalah sampah yang tersebar di mana saja. Daerah kota menjadi kacau dan tata ruang kota menjadi tidak menentu sehingga menimbulkan berbagai masalah di antaranya adalah banjir. Di satu pihak kehadiran migran sangat bermanfaat bagi pengembangan kota dan warganya tetapi di lain pihak menjadi bencana karena pemerintah kota tidak siap menerima kedatangan mereka. Kehadiran migran yang tidak terencana ini dan semua berjalan secara darurat berakibat pada terciptanya kesemrawutan kota. Kota tidak lagi kota yang tertata dan tidak juga sebagai tempat kehidupan yang nyaman. Kota sebagai pusat pemerintahan dan pusat pendidikan serta pusat perekonomian bercampur aduk karena tidak siapnya kota menerima kaum migran. Keterbatasan akan sarana kota pun muncul seperti perumahan, air bersih, lembaga kesehatan, lembaga pendidikan, listrik dan angkutan kota, dan sebagainya.

PEMBAHASAN

Bencana alam seperti banjir bisa terjadi di mana saja jika keseimbangan alam dan manusia tidak dijaga. Ketidakseimbangan ini pun bisa terjadi jika apa yang dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha serta masyarakat Medan di dalam membangun Kota Medan sama saja seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha serta masyarakat Jakarta. Pemerintah Kota Medan dan masyarakat pengusaha serta warga Kota Medan juga telah mengeksploitir alam di atas daya dukungnya. Oleh sebab itu berhati hatilah. Pengusaha dan masyarakat Medan yang dikendalikan oleh pemerintah Kota Medan jangan menganggap enteng dengan pengalaman banjir Jakarta. Satu saat kita juga bisa seperti Jakarta jika tidak ada upaya yang efektif yang kita lakukan pada pembangunan dan pengembangan kota Medan.

Jika kita mau melihat, sebenarnya karakteristik kota dan pemerintahan serta perilaku masyarakatnya antara Jakarta dan Medan menggambarkan kesamaan. Secara georgafis keduanya berada di daerah dataran rendah yang berawa-rawa dan dihuni oleh

multietnis pendatang dan sekaligus menciptakan perilaku masyarakat yang beragam. Kedua kota merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan serta industri dan sekaligus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitar. Keduanya merupakan pelabuhan internasional (laut dan udara) dan menjadi pintu masuk dan keluarnya barang dan orang antarnegara. Keduanya juga menjadi tumpuan hidup kaum migran yang berasal dari desa desa, yang pembangunan daerahnya tertinggal dan sekaligus menjadi daerah harapan hidup masa mendatang.

Dengan demikian beban Kota Medan semakin berat sementara daya dukung kota semakin melemah. Situasi seperti ini akan berjalan terus seperti bola salju. Ini suatu masalah besar bagi Pemerintah Kota Medan. Oleh sebab itu pembangunan infrastruktur Kota Medan harus lebih cepat dari membesarnya bola salju yang bergulir. Penggunaan anggaran belanja kota Medan harus tepat sasaran dan mengerti apa yang harus didulukan. Ini harus disadari betul. Namun berdasarkan pantauan saat ini pemerintah kota Medan sendiri sudah tidak mampu mengimbangi besarnya pengembangan bola salju tersebut bahkan infrastruktur kota yang ada dalam kondisi terlantar.

Salah satu bukti semakin beratnya beban fisik Kota Medan adalah tumbuhnya rumah “rumah bertingkat kumuh” di tengah kota, di pinggiran sungai, baik dibuat dari papan maupun beton. Mengapa dikatakan kumuh karena rumah rumah tersebut dibangun berdempetan dan saling sambung menyambung tanpa ada suatu perencanaan. Kalau dilihat dari arah belakang persis seperti kandang ayam yang ada di kampung kampung. Keindahannya jangan ditanyakan karena tidak di cat/kapur. Ini semua bisa dilihat dari lantai atas gedung Bank Mandiri Lapangan Benteng atau RS Gleaneagles Jalan Listrik. Semuanya akan terlihat jelas keasliannya. Ini berbeda sekali dengan Jakarta di mana rumah bertingkatnya adalah justru memperindah kota.

Arti dari rumah bertingkat kumuh tersebut adalah manusia yang hidup di Kota Medan sudah terlalu banyak. Mereka tidak bisa lagi membangun rumah secara horizontal. Mereka harus memanfaatkan lahan yang sama untuk keluarga yang terus bertambah. Untuk itu mereka membangun rumah berbentuk vertikal. Kalau tadinya

pada sebidang tanah bermukim lima orang sekarang dalam bidang tanah yang sama bermukim lima belas orang kalau lantai bangunan tersebut adalah tiga. Cukupkah itu saja. Jawabnya juga tidak. Penggunaan dan pembuangan limbah rumah tangga semakin banyak dan tidak dapat lagi tertampung oleh *drainase* dan lapangan terbuka yang tersedia. Bahkan, oleh warga sebagian besar limbah rumah tangga di buang ke sungai. Penduduk pun terpusat di tengah kota sehingga muncul kesemrawutan kota. Sejak anak-anak sampai menikah dan melahirkan, beraktivitas, makan, mandi serta ke jamban semuanya dilakukan di pusat kota. Sangat-sangat mengerikan dan semuanya memerlukan perhatian pemerintah kota.

Medan bukan Medan yang dulu lagi, sewaktu penjajah Belanda mengatur kota ini. Sekarang Kota Medan dibangun tanpa arah yang jelas, baik kewilayahannya maupun aktivitas manusia di atas wilayah tersebut. Hal ini tidak bisa dibiarkan terkecuali jika kita ingin mengundang datangnya musibah banjir. Ini adalah secuil cerita mengenai pusat Kota Medan. Kita belum bercerita mengenai nasib daerah pinggiran kota. Jangan tanyakan masalah *drainase*, parit yang ada juga sudah penuh dan tidak pernah kering walau hujan tidak pernah turun. Anak-anak sungai juga sudah banyak yang mati ulah dari warga kota di samping tidak berfungsinya dinas penataan ruang kota. Jika nanti hujan turun kemana air akan mengalir. Oleh sebab itu jika bencana banjir tiba, jangan salahkan siapa pun, terkecuali kita bertanya: sudahkah kita menjaga kelestarian lingkungan dan sudahkah dinas penataan ruang kota melakukan perawatan dan pengawasan terhadap *drainase* yang ada.

Masalah banjir Kota Medan adalah masalah kota dan warganya sendiri. Kecil sekali urusannya dengan daerah lain. Selama keduanya masih juga tidak peduli dengan kondisi Kota Medan saat ini maka bencana banjir besar pasti datang. Jangan salahkan musim dan hujan yang lebat. Dan jangan pula salahkan daerah hulu sebagai sumber banjir kiriman. Untuk mengurus daerah hilir yang merupakan wilayah Medan kita tidak mampu mengapa kita harus menyalahkan daerah hulu yang justru bukan wilayah Medan. Ini semua adalah masalah internal Kota Medan dan warganya. Lebih baik berbenah diri sejak sekarang daripada banjir

besar datang. Jika tidak berbenah maka banjir Kota Medan masa mendatang lebih disebabkan karena Pemerintah Kota Medan lalai menjalankan fungsinya. Juga karena warga Medan tidak peduli akan lingkungannya.

Banyak warga berkata, yang menyalahkan pemerintah kota, yang tidak siap mengantisipasi datangnya banjir. Melihat pada keadaannya saat ini, hal itu memang benar. Tapi hendaknya warga kota juga harus melihat tanggung jawabnya terhadap wilayah sekitar di mana ia berada. Sebagian besar warga kota tidak mempunyai kesadaran untuk menjaga lingkungan wilayahnya. Warga kota seenaknya melanggar peraturan kota, membangun rumah seenaknya, trotoar dan parit dijadikan warung, membuang sampah di mana saja seperti layaknya hidup di daerah yang tidak bertuan. Situasi pun menjadi kumuh, sungai-sungai dan saluran air yang merupakan infrastruktur kota jadi menyempit dan kurang berfungsi. Bahkan pembangunan rumah kumuh dan rumah mewah dibiarkan mengambil sepadan sungai dan *drainase* sehingga saluran air menjadi tersendat. Pemerintah Kota Medan tidak berdaya dan tidak mau tahu dengan keadaan ini dan semuanya berbicara tanpa tindakan. Lembaga kedinasan tidak berfungsi sementara itu petugasnya juga tidak profesional. Jadi kesalahan itu ada pada pejabat dan petugas Pemerintah Kota Medan ditambah dengan ketamakan warga kota yang berpikiran pendek.

Keberadaan Kota Medan yang berpotensi terjadinya banjir besar bukanlah suatu pandangan yang emosional dan bukan suatu pandangan untuk menyalahkan siapa pun. Tulisan ini disajikan untuk menentukan apa yang seharusnya kita lakukan saat ini sebelum banjir besar seperti Jakarta datang. Fenomena lapanganlah yang menyatakan banjir besar Medan pasti terjadi. Oleh sebab itu berbenahlah dan mari kita selesaikan akar permasalahannya. Akar permasalahannya terletak pada tumpatnya saluran air dan semakin sempitnya daerah resapan air. Hutan beton dan halaman beton berperan besar memperkecil resapan air. Inilah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Medan. Jika ditanya apakah rencana pembenahan *drainase* belum ada maka jawabannya ada tapi di kantor kota. Di lapangan sama sekali tidak terlihat. Padahal pembangunan sebuah kota tidaklah selesai hanya dengan mencoret

coret sebuah *blue print* di kamar yang dingin. Pembangunan sebuah kota adalah pembangunan nyata di mana warga kota dapat hidup nyaman dan tenteram.

Mari kita berpikir bersama, yang mana yang perlu kita dahulukan antara pembangunan banjir kanal yang sekarang sedang dalam proses pembuatan dengan merehabilitasi serta memfungsikan sungai sungai besar dan anak anak sungai, parit, *drainase* yang ada di dalam Kota Medan. Apakah ada jaminan, Kota Medan tidak akan banjir kalau banjir kanal dibangun sementara sungai-sungai besar dan anak-anak sungai, parit dan *drainase* dalam kota tidak dikembalikan fungsinya dan rumah mewah dan rumah liar yang menyempitkan saluran air tidak ditertibkan. Oleh sebab itu bekerjalah pada akar permasalahan. Membangun banjir kanal adalah baik tapi ada persyaratan yang harus diikuti. Merawat yang lama adalah lebih baik daripada membangun yang baru kalau tidak mengena pada akar permasalahan. Merehabilitasi dan memfungsikan empat sungai besar dan puluhan anak sungai yang mengalir di tengah Kota Medan akan jauh lebih efektif daripada membangun sebuah banjir kanal di dalam mengatasi banjir Kota Medan.

Di sinilah kekeliruan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Medan selama ini. Kebijakan yang dipakai selalu berdasarkan pendekatan pertumbuhan (*growth approach*) tanpa memperhatikan ekologi (*environmental and natural resources*). Itu berarti Pemerintah kota Medan tidak mengerti apa sebenarnya fungsi kota bagi warganya. Apa yang dilakukan pemerintah kota adalah kebijakan yang sudah tidak dipakai lagi di banyak negara. Kebijakan yang berjalan saat ini harus mengkaitkan *growth* dengan *ecology*, mengingat sudah terbatasnya *natural resources* dan rusaknya *environmental* dan perlunya *efficiency*. Pemerintah kota lebih senang membangun yang baru (*growth approach*) daripada merawat yang lama, lebih senang pada pembangunan kemewahan kota daripada memperkuat fungsi kota. Dan semuanya hanya direncanakan untuk kepentingan jangka pendek.

KESIMPULAN DAN SARAN

Artikel ini adalah sebuah telaahan akademis, dari sebuah survei yang dilakukan, yang disampaikan sebelum banjir besar muncul. Kita harus mengantisipasi banjir justru pada saat banjir tersebut belum muncul. Kita secara bersama tidak menghendaki datangnya banjir tetapi kita pun harus berupaya mengantisipasinya dengan melakukan berbagai tindakan yang dapat menangkal banjir tersebut. Kesepakatan pemerintah Kota Medan dengan kelompok pengusaha serta masyarakat secara keseluruhannya memang dinantikan bagi mengantisipasi banjir. Ketiganya perlu memberikan komitmen yang kuat bagi kepentingan kita semua.

DAFTAR RUJUKAN

- Catanese, Anthony J. dan James C. Snider, 1992, *Perencanaan Kota*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Gallion, Arthur B. dan Simon Eisner, 1994, *Pengantar Perancangan Kota-Desain dan Perencanaan Kota*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Haskoning, 1992, *Study of River Flows and Flood Control in Medan River Basins: Drainage Component*, Medan.
- Huszar Brammah and Associates, 1995, *Metropolitan Mebidang Urban Development Programme Program Jangka Menengah (PJM) 1997/1998–2001-2002 Kotamadya Medan*, Medan.
- Laporan Rencana Kerja Terpadu Pengelolaan Banjir di Kota Medan*, Pemerintah Kota Medan, Medan, 2004.
- Miraza, Bachtiar H., 2005. *Pengembangan dan Perencanaan Wilayah*. ISEI Bandung.
- Monografi Kota Medan*, Bappeda Kota Medan, Medan, 2002.
- Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Medan*, Pemerintah Kotamadya Tk II Medan, Medan, 1993.

PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERENCANAAN WILAYAH (*Spatial Planning and Regional Planning*)

Sirojuzilam

Dosen FE dan SPs USU
siro_juzilam@yahoo.co.id

Abstract: *The challenge in regional development is to manage and to guide the region well. A good regional planning should be prepared to minimize the region problem. Systemic and comprehensive approach is a good method for the local government. Spatial planning of a regional planning is currently a very interesting issue.*

Keywords: *planning, regional planning and spatial planning*

PENDAHULUAN

Berbagai permasalahan yang selama ini dapat dilihat adalah penanganan masalah banjir, transportasi dan kemacetan, kebersihan dan persampahan, penataan PKL, ruang terbuka hijau yang tidak memadai, pemukiman kumuh, tata ruang, dan lain-lain.

Permasalahan ini hendaklah dilakukan secara terkoordinasi dan terencana yang selama ini sangat kurang dirasakan. Penanganan yang komprehensif dan terintegrasi serta melibatkan masyarakat adalah hal yang segera harus dilakukan. *Community planning dan participatory planning* adalah pendekatan yang dapat dipergunakan, sehingga masyarakat merasakan bahwa wilayah Medan adalah milik bersama bukan hanya dirasakan oleh pihak tertentu.

Dalam upaya pembangunan wilayah, masalah yang terpenting yang menjadi perhatian para ahli ekonomi dan perencanaan wilayah adalah *menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan*. Perbedaan teori pertumbuhan ekonomi wilayah dan teori pertumbuhan ekonomi nasional terletak pada sifat keterbukaan dalam proses *input-output* barang dan jasa maupun orang. Dalam sistem wilayah keluar masuk orang atau barang dan jasa relatif bersifat lebih terbuka, sedangkan pada skala nasional bersifat lebih tertutup (*closed region*).

Proses terjadinya pertumbuhan wilayah dipengaruhi berbagai faktor baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Belum adanya teori yang menyeluruh menyebabkan pertumbuhan wilayah dapat dipandang dari berbagai sudut. Kuznets (dalam Jhingan, 1990)

mendefinisikan pertumbuhan ekonomi, sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduk atau masyarakat.

Berbagai masalah timbul dalam kaitan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah, dan terus mendorong perkembangan konsep-konsep pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam kenyataannya banyak fenomena tentang pertumbuhan ekonomi wilayah. Kesenjangan wilayah dan pemerataan pembangunan serta perencanaan tata ruang menjadi permasalahan utama dalam pertumbuhan wilayah.

Investasi dan perkembangan ekspor di suatu wilayah memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, karena selain menghasilkan pendapatan juga menciptakan efek penggandaan (*multiplier*) pada keseluruhan perekonomian di wilayah tersebut, sehingga sangat penting diamati dua aspek pokok, yaitu: 1) Pentingnya peranan kekayaan alam suatu daerah pada berbagai tingkat pembangunan ekonomi dan 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya *multiplier effect* dari sektor ekspor terhadap keseluruhan perekonomian daerah.

Pengembangan wilayah pada dasarnya mempunyai arti peningkatan nilai manfaat wilayah bagi masyarakat suatu wilayah tertentu mampu menampung lebih banyak penghuni, dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rata-rata membaik, di samping menunjukkan lebih banyak sarana/prasarana, barang atau jasa yang tersedia dan kegiatan usaha-usaha masyarakat yang meningkat, baik dalam arti jenis, intensitas, pelayanan maupun kualitasnya.

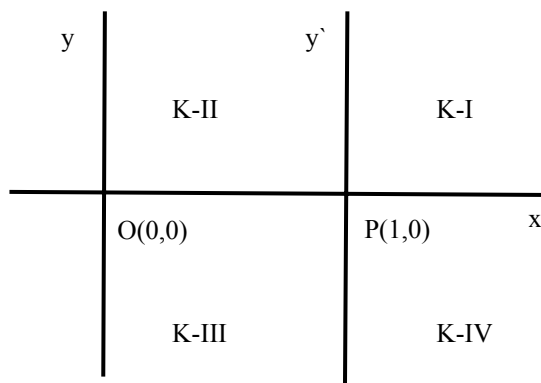
HASIL

Regional Cycle (Daur Perkembangan Wilayah)

Analisis yang dipergunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dari setiap daerah di dalam proses pembangunannya salah satunya adalah dengan *klassen typology*. Hipotesis ini dipergunakan untuk melihat daur atau arah perkembangan daerah-daerah, dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi daerahnya. Sebagai alat analisis, maka ada 2 (dua) variabel yang menjadi ukuran dari hipotesis ini yaitu:

1. Perbedaan antara laju pertumbuhan pendapatan per kapita daerah dengan laju pertumbuhan pendapatan per kapita nasional.
2. Perbandingan antara pendapatan per kapita daerah dengan pendapatan per kapita nasional dan hasil perbandingan ini selalu bernilai positif.

Kedua variabel tersebut dibentuk dalam sistim koordinat x-y pada keempat bidang kuadran (I,II,III, dan IV).



Gambar 1. Sistim Koordinat x-y dengan Titik Pusat (1,0)

Dengan meletakkan koordinat daerah (x,y) pada sistim koordinat x-y, maka terlihat sebaran daerah-daerah pada bidang kuadran di mana tiap bidang kuadran mempunyai karakteristik atau tipologi yang berbeda-beda. Pada kuadran I adalah daerah-daerah dalam keadaan berkembang (*developed*), Pada kuadran II adalah daerah-daerah yang sedang berkembang (*developing*), pada kuadran III adalah daerah-daerah yang tidak atau belum berkembang (*underdeveloped*) sedangkan pada kuadran IV adalah daerah-daerah yang perkembangannya mulai menurun (*stagnant*).

Secara matematis tipologi Klassen dapat diuraikan sebagai berikut:

$$\frac{U_i^1 - U_i^0}{U_i^0} \text{ Laju pertumbuhan pendapatan per kapita daerah}$$

$$\frac{U^1 - U^0}{U^0} \text{ Laju pertumbuhan pendapatan per kapita nasional}$$

$$Y_i = \frac{U_i^1 - U_i^0}{U_i^0} - \frac{U^1 - U^0}{U^0} \dots\dots(1)$$

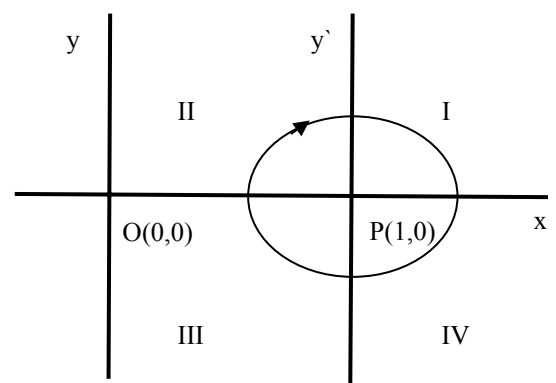
$$X_i = \frac{U_i}{U} \dots\dots\dots(2)$$

atau $\log X_2 = \log U_i - \log U$

di mana:

- u_i : pendapatan per kapita daerah
- u : pendapatan per kapita nasional
- u_i^0 : pendapatan per kapita daerah i pada tahun t_0
- u_i^1 : pendapatan per kapita daerah I pada tahun t_1
- u^0 : pendapatan per kapita nasional pada tahun t_0
- u^1 : pendapatan per kapita nasional pada tahun t_1

Jadi Y_1 sama dengan turunan pertama dari X_1 . Sebagai kesimpulan, dalam titik I (x_1, y_1) bergerak dengan lintasan searah dengan jarum jam seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Sistem Koordinat Searah Jarum Jam

Bertitik tolak dari perbedaan lintasan ini dapat diketahui apakah lintasan pergeseran mengarah pada ketidakserasian laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada prinsipnya analisis dari Klassen dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu: analisis yang bersifat statis dan analisis

yang bersifat dinamis. Dengan perkataan lain analisis statis hanya melihat klasifikasi daerah berdasarkan pada periode atau tahun tertentu, sedangkan analisis dinamis lebih melihat perkembangan daerah dengan mengamatinnya dari 2 (dua) momentum yaitu momentum awal dan momentum akhir. Dengan mengetahui kedua momentum tersebut, kemudian dapatlah dilihat arah perkembangan dari masing-masing daerah sekaligus melihat posisi awal dan posisi akhir dari daerah-daerah.

Tabel 1. Matriks Perkembangan Daerah -Daerah

Pendapatan Per Kapita / Pertumbuhan Ekonomi	$Y_i > Y$	$Y_i < Y$
$G_i > G$	Daerah Maju	Daerah Berkembang
$G_i < G$	Daerah Stagnant	Daerah Terbelakang

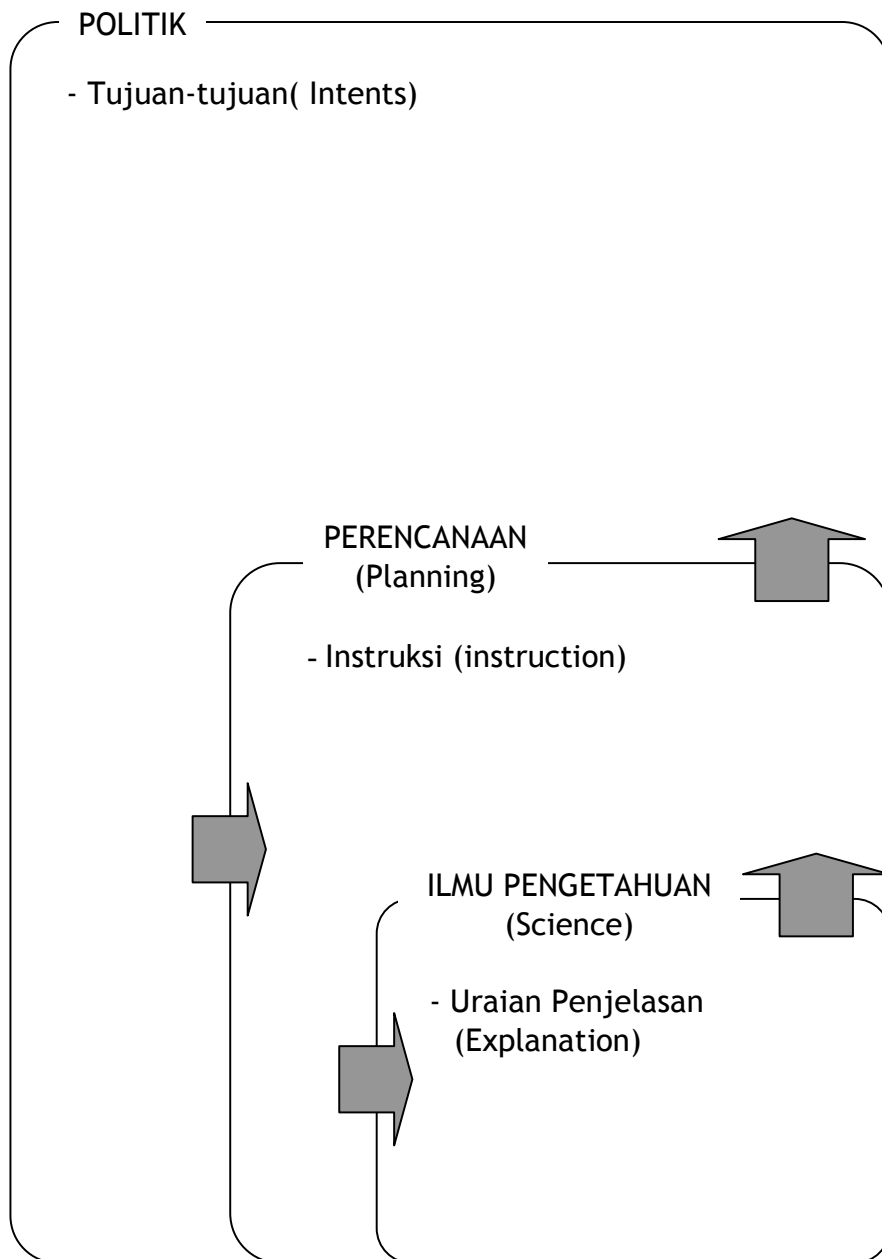
Apabila perkembangan daerah dilihat dari membandingkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi tingkat nasional di satu pihak dan pendapatan per kapita daerah dengan pendapatan per kapita nasional di lain pihak, maka matriks perkembangan daerah dapat dijelaskan pada Tabel 1.

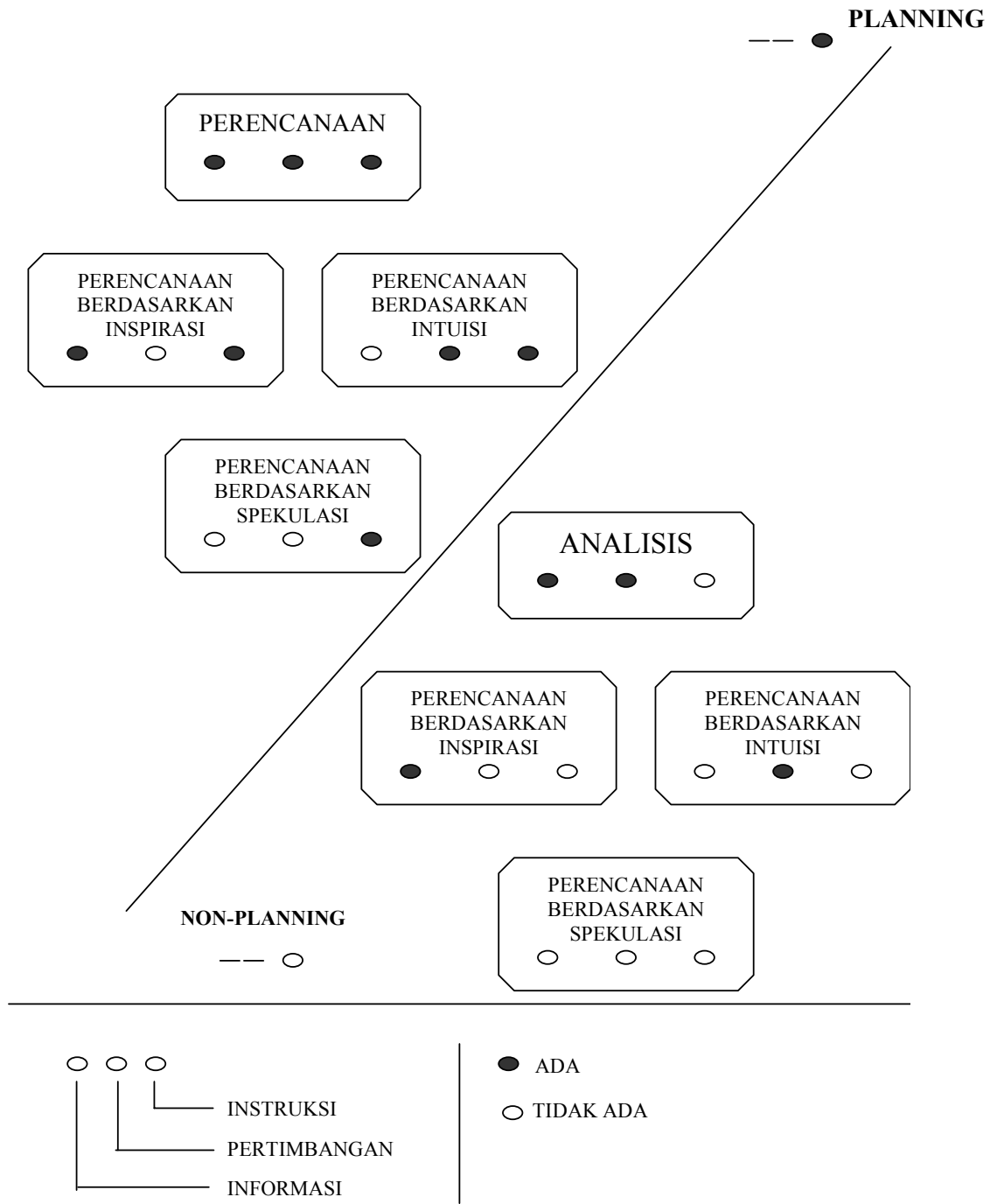
Di samping menganalisis bagaimana perkembangan atau daur pembangunan yang terjadi antar daerah, maka cara lain untuk melakukan tindakan komperasi antardaerah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis *interregioanal comparison* terutama untuk melihat perkembangan tidak hanya yang berkaitan dengan indikator ekonomi akan tetapi juga terhadap indikator sosial seperti yang ditunjukkan oleh tabel berikut serta kaitan kajian ini dengan aspek *wilayah planning* (Haidemann, 1990).

SECTOR	REGION				
	1	...	j	...	n
<i>EXTRACTION</i>					
- <i>Materials</i>					
- <i>Energy</i>					
<i>CULTIVATION</i>					
- <i>Crops</i>					
- <i>Livestock</i>					
<i>FABRICATION</i>					
- <i>Crafts</i>					
- <i>Industry</i>					
<i>DISTRIBUTION & BROKERAGE</i>					
- <i>Trade</i>					
- <i>Transport</i>					
- <i>Financing</i>					
- <i>Insurance</i>					
<i>ENTERTAINMENT</i>					
- <i>Amusement</i>					
- <i>Boarding & Lodging</i>					
<i>TUTELAGE</i>					
- <i>Health</i>					
- <i>Education</i>					
- <i>Fostering</i>					
<i>ADMINISTRATION</i>					
- <i>Cohesion</i>					
- <i>Security</i>					

Gambar 3: Sector-Region Array for Interregional Comparison

PERENCANAAN: Hubungannya dengan Politik/Ilmu Pengetahuan





PEMBAHASAN

**Perencanaan Tata Ruang
Perencanaan**

1. Perencanaan: Penyusunan **tindakan** yang akan dilakukan untuk mencapai **tujuan**. **Tujuan**: sebuah status yang diinginkan. **Tindakan**: kegiatan, kelakuan terhadap sesuatu obyek yang secara **rasional diketahui** akan mendekatkan pada status yang diinginkan

2. Sebuah cara berfikir yang berorientasi pada masa depan dengan sifat preskriptif menggunakan metode dan sistematika yang rasional.
3. Perencanaan adalah penerapan metode ilmiah dalam pembuatan kebijakan publik.
4. Perencanaan adalah upaya untuk mengaitkan pengetahuan ilmiah dan teknis dengan tindakan-tindakan dalam *domain* publik.

5. Perencanaan adalah upaya sadar untuk memecahkan masalah dan mengendalikan rangkaian kejadian masa depan melalui pandangan jauh ke depan, pemikiran sistematis, penyelidikan dan pengkajian pilihan nilai-nilai di dalam memilih berbagai alternatif langkah tindakan.

Maksud Perencanaan

Perencanaan adalah suatu bentuk tindak sosial yang diarahkan pada wujud bentuk lingkungan fisik yang dalam prosesnya dipacu oleh nilai-nilai moral, politik dan estetik.

Perencanaan adalah intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial-masyarakat dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian yang ada dengan:

- meningkatkan efisiensi dan rasionalitas
- membantu atau menggantikan pasar
- merubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat.

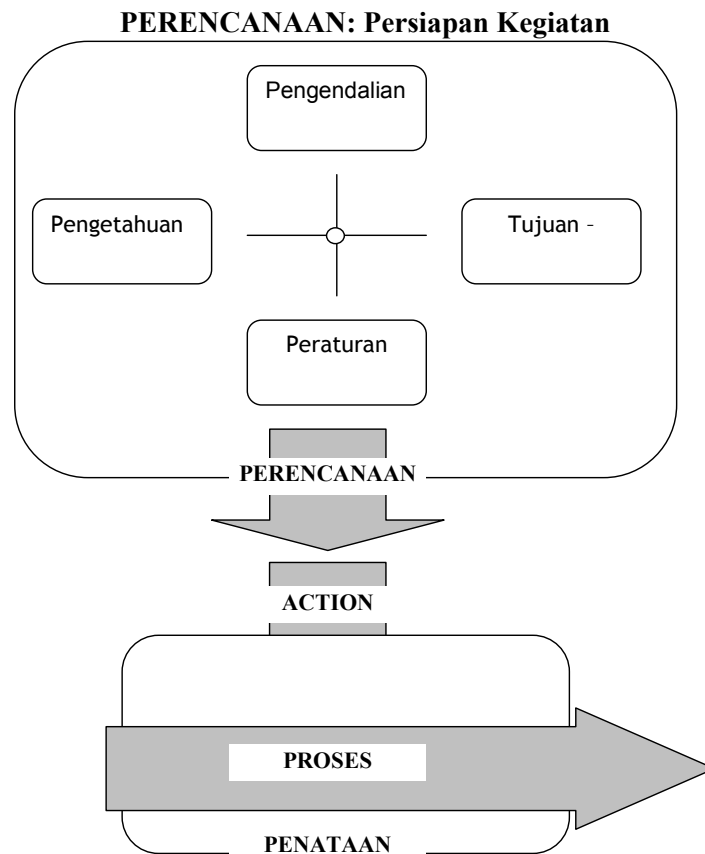
Bagaimana Perencanaan Dilakukan?

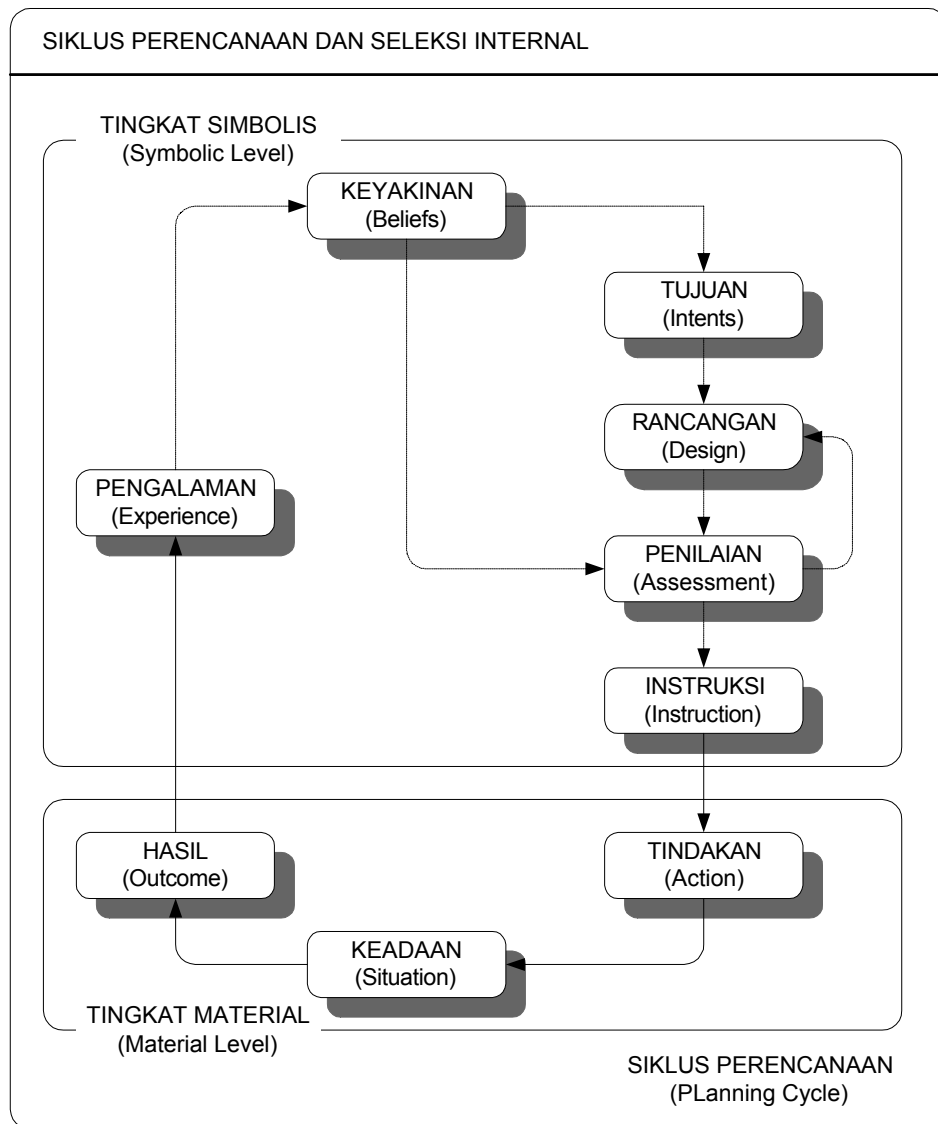
1. Menentukan tujuan dan sasaran perencanaan dalam proses politik yang menyertakan seluruh warga.

2. Mengetahui fakta-fakta tentang kondisi yang ada dan latar belakangnya, serta memperkirakan apa yang bakal terjadi dalam situasi-situasi tertentu.
3. Mengkaji pilihan-pilihan tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan mengingat potensi dan hambatan yang ada.
4. Menentukan pilihan-pilihan yang terbaik berdasarkan pertimbangan normatif maupun teknis, di dalam konteks partisipatif.
5. Mengusulkan rangkaian kebijakan dan tindakan yang perlu diambil dalam pelaksanaan pilihan yang diambil.
6. Melakukan langkah-langkah implementasi melalui tindakan sosialisasi, penegakan, pemberian insentif dsb., serta memantau pelaksanaan secara sistematis dan teratur.

Memulai Proses Perencanaan

1. Memandang ke masa depan yang tidak berkepastian.
2. Mengetahui adanya masalah sosial-ekonomi yang akut.
3. Menyadari adanya faktor internal dan eksternal yang harus ditanggapi.
4. Menyadari kebutuhan untuk menyusun langkah dan kebijakan secara kolektif.





Penataan Ruang

(1) Suatu proses rekayasa lokasi benda, kegiatan, dan perubahan di dalam ruang (Soenarjono Danudjo, 1987). (2) Suatu wujud tata guna bumi, angkasa, air, yang ketiganya disebut tata ruang (idem). (3) Suatu proses transformasi ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan fisik di dalam ruang (T. Wiranto, 2004). (4) Suatu proses pengarahan mekanisme pasar, politik, keswadayaan, atau gabungan dalam dimensi tatanan ruang (*spatial arrangement*) (T. Wiranto, 2004). (5) Tata ruang terbentuk dari aliran kegiatan dan pemanfaatan ruang daratan, perairan, dan angkasa oleh masyarakat (*flow of activity and space utilization by the people*). (6) Tata ruang adalah wujud struktural pemanfaatan ruang merespons keputusan publik, tindakan

kolektif, dan aliran kegiatan sosial-ekonomi di dalam ruang. (7) Tata ruang memproduksi struktur wilayah dan permukiman untuk mewadahi kehidupan manusia (*human settlement*).

Paradigma dalam Perencanaan Tata Ruang (*Paradigm in Spatial Planning*):

1. *Planning as political process*
2. *Planning as public policy and societal guidance*
3. *Planning as social transformation and collective action*
4. *Spatial planning as a tool of governing the market*
5. *Spatial planning as a tool of collective action*
6. *Spatial planning as a tool of region and human settlements development.*

Institutional Reform in Spatial Planning:

1. *System, methodology and procedure*
2. *Institutional capacity building*
3. *Resource input mobilization*
4. *Individual competency and organizational capacity in spatial planning activities.*

Kebutuhan Akan Perencanaan Tata Ruang:

1. *New housing area development and improvement*
2. *Local infrastructure*
3. *New town development*
4. *Natural resources and land utilization*
5. *Tourism area development*
6. *River basin development*
7. *Coastal and marine area development*

DAFTAR RUJUKAN

- Arsyad, Lincoln, 1992, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Azis, Iwan Jaya, 1994, *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*, LPFE-UI, Jakarta.
- Bendavid-Val, Avrom, 1991, *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*, 4th Edition, Praeger Publisher, New York.
- Den Berg, Van Hendrik, 2001, *Economic Growth and Development*, McGraw-Hill Companies, New York.
- Dombusch/Frischer/Mulyadi, 1992, *Makroekonomi*, Erlangga, Edisi ke-4, Jakarta.
- Glasson, John, 1977, *Pengantar Perencanaan Regional*, LPFE-UI, Jakarta.
- Isard, Walter, 1960, *Methods of Regional Analysis*, MIT Press.
- Jhingan, M. L., 1993, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- O'Sullivan, Arthur, 2003, *Urban Economics*, McGraw-Hill, Fifth Edition, New York.
- Perroux, F. 1988. "The Pole of Development's New Place in a General Theory of Economic Activity". dalam B. Higgins dan D.J. Savoie (ed) *Regional Economic Development: Essays in Honour of Francois Perroux*. Boston, Unwin Hyman.
- Richardson, Harry W., 1991. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*, Terjemahan Paul Sitohang, Jakarta, LPFE-UI.
- Salim, Emil, 1980. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*, Jakarta, Idayu.
- Sjafrizal, 1985. "Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah", dalam *Prisma*, No. 12, 15-24, Jakarta, LP3ES.
- Sjafrizal, 1997. "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat", dalam *Prisma* Vo. IV Tahun ke XVI, Jakarta, LP3ES.
- Todaro, Michael P., 2003, *Economic Development*, Eight Edition, Pearson Education Limited, Eidenburg Gate, Harlow, Essex, England.

IMPLEMENTING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR LAND USE AND SPATIAL PLANNING

Wahyu Ario Pratomo

Ketua Departemen EP FE USU

E-mail: wahyuario@yahoo.com

***Abstract:** Nowadays, a local government has to improve their own financial ability in order to enhance the quality of life of the local community. Although, the local governments have successfully increased their own earnings, they have not yet optimized the potential income. Moreover, regarding to Wagner's Law, the government budget has to improve through the years simply as the public needs increased. Based on this condition, the local government should prepare strategic policies by using creativity and intelligent in optimizing local earnings. One way to support those strategic policies is by using information technology. The implementation of information technology by a local government is started from the development process planning until preparing public services and optimizing local potential economy. The Geographic Information System (GIS) is recently used to support those activities.*

***Keywords:** GIS, land use and spatial planning*

INTRODUCTION

The establishment of Law No. 22 and Law No. 25 in 1999, which subsequently renewed by Law No. 32 and Law No. 33 in 2004 that concern about administrative decentralization and financial balancing between central government and regional government. The objective of regional autonomy basically, is to enhance the development process in each region. This condition is based on the presumption that the community in a region has more understanding about the problems and their solution than central government. The other objective is to reduce the gap between regions and to enhance the quality of public services. To sum up, the autonomy is more responsive to the needs of each region and its potencies as well.

The regional autonomy so far has created a change in fiscal management. In National Government Budget (APBN) year 2006, total budget that channel to regions by fiscal decentralization scheme is about Rp 219.4 trillions or 7.0 percent of GDP (Gross Domestic Product) of Indonesia. This number increases very high compare to in year 2000, where the fiscal decentralization only about Rp 33.5 trillion or 3.7 percent of Indonesia's GDP.

In the implementation of regional autonomy, the region is given authority to

classify local earnings (PAD). The earnings together with fiscal decentralization fund (DAU and DAK) will be arranged by local government independently to disburse all of local expenditures. These expenditures' objective is to stimulate local economic growth.

Nowadays, the local government has to improve their own financial ability in order to enhance the quality of life of the local community. The North Sumatra government has successfully increased its original local earnings (PAD) from 423.1 billion in 2001 to Rp 1.377 trillion in 2006. The same conditions also occurred in local government earnings in North Sumatra Province. Although, the local governments have successfully increased their own earnings, they have to optimize the potential income in the future. According to Wagner's Law, the government budget has to improve through the years simply as the public needs increased. Based on this condition, the local government should prepare strategic policies by using creativity and intelligent in optimizing local earnings. One way to support those strategic policies is by using information technology.

The implementation of information technology by a local government is started from the development process planning until preparing public services and optimizing

local potential economy. The Geographic Information System (GIS) is commonly used nowadays in order to support those activities.

Developing information technologies like Geographical Information Systems (GIS) and Remote Sensing (RS) considerably support managerial decision making process to manage spatial planning. The management of spatial is an important issue to prevent the harmful effects of environmental changes. The spatial planning was determined with the using of Geographic Information System (GIS) technologies. In this study, spatial data attempt to clarify the usage of GIS to establish the spatial planning in North Sumatra. The system provides some advantages including updated and maintained data in a common platform and local government decision making process.

RESULT

Land Use Planning

Provinces and Regencies throughout Indonesia are dealing with an increasing number of sociological and physical changes which are commonly influenced by the changing of land use changes. Furthermore, land use planning in the Indonesia is actually done largely through zoning. According to Miller (1985) zoning relates to determining the best or the most suitable uses for all different parts of land in a certain area. This method is primarily concerned with preservation of long-term development of an area, which in Indonesia called Spatial and Regional Planning (RTRW).

Land use planning is a comprehensive strategy that is designed to assist achieves local and regional objectives (Branch, 1988). A land use plan is also used as a way for guiding and administering zoning ordinances for regulation of land and future locations of facilities in an area (Banovetz, 1984). The requirements from different areas may vary, but they must be consistent within a zone (Meshenberg, 1976). In addition, an ordinance will further subdivide the zones into different classifications with varying standards that shape each particular area (Johnson, 1989). Without these measures of control, many areas or region in Indonesia would be chaotic, messy assortments of structures lacking identity and direction. Hammond (1996) states that land use planning should be used to improve the environment in which we all live in.

Friedmann (1987) explains planning is a future-oriented activity, strongly conditioned by the past and present. It links “scientific and technical knowledge to actions in the public domain”. Ideally, it happens via public discourse between all groups and individuals interested in and/or affected by urban development and management activities pursued by the public or private sector. In practice, such comprehensive sharing of information and decision making is rarely found. At their best, urban and regional planning agencies are rich, dynamic arenas where many societal problems and solutions are explored and addressed in a direct and tangible way. Examples of such problems are: urban growth; unemployment and economic revitalization; transportation; environmental degradation and protection; neighborhood decline and redevelopment; historic preservation; conservation of land and natural resources; and provision of open space, parks, and recreational facilities.

Land use planning must integrate professional technicians, planners, planning commissions, elected officials, local governments and local parliament (DPRD) to arrange and develop plans that represent the views of the majority (Isberg, 1975). The problem with developing these plans for land use tends to occur with the fact everyone has a different idea on how the land should be used or is being used. Cullingsworth (1993) suggests that in the case of land uses planning, these opinions are better to be stratified across generations, socioeconomic classes, ethnicity and location factors and ideologies. All of those groups bring their own personal agendas and opinions to the planning process. The views of land use planning very widely throughout the different segments of society because it is viewed as placing restrictions on personal property. Decisions makers in a township have a huge amount of opinions to evaluate and consider in regards to land use.

There are several objectives of land use and spatial planning. Firstly, land use planning is designed to influence the future distribution of activities in space. Secondly, it is made to coordinate the spatial impact of other sectoral policies. Thirdly, land use planning can create a more rational territorial organization of land uses and the linkages between them. Last but not least, land use

can balance demands for development with the need to protect the environment as well as to achieve social and economic objectives.

Benefit of GIS in Spatial Planning

Planners have always sought tools to enhance their analytical, problem-solving, and decision-making capabilities (Mandelbaum, 1996). Beginning in the late 1950s, planners started to develop and use computerized models, planning information systems, and decision support systems to improve performance (Brail 1987). The adoption of a geographic information systems (GIS) and land information systems is a more recent manifestation of the same effort to incorporate new tools and technologies. Planning departments have been on the forefront of GIS use among local government agencies (French and Wiggins 1990). The planners’ interest in GIS and other geospatial technologies derives from the spatial nature of urban phenomena and from the interdisciplinary nature of urban planning.

Geographic Information Systems (GIS) provides the necessary means to forecast or analyze information in a spatially viable manner for a prescribed area. Modeling with GIS provides useful visual representations of the environment or jurisdictional areas. Developing a land use planning model

should include all major variables that considers and integrates information as a medium for accurate, factual and visually shared perceptions for responsible decisions. The hope for a land use model is to provide spatially visible and viable results that can be forecasted to a township or the entire county. Using a GIS system also allows for the merging of data to view the interconnectedness of the variables commonly associated with land use planning. Models will help put issues into perspective and give each issue relative importance.

A GIS allows access to large amounts of information quickly and efficiently. Geographic Information Systems let you visualize information in new ways that reveal relationships, patterns, and trends not visible with other popular systems (Environmental Systems Research Institute, 1999). A GIS is a thematic mapping system, meaning you can produce maps based on themes such as soils or hydrology. Map features can be linked to corresponding information contained in database tables. Another advantage of GIS is that it is a dynamic product rather than a static product, making it is easy to update, edit, and reproduce maps. Multiple layers of maps can be quickly displayed in a variety of overlap, scales, and combinations to fit the needs of the user.

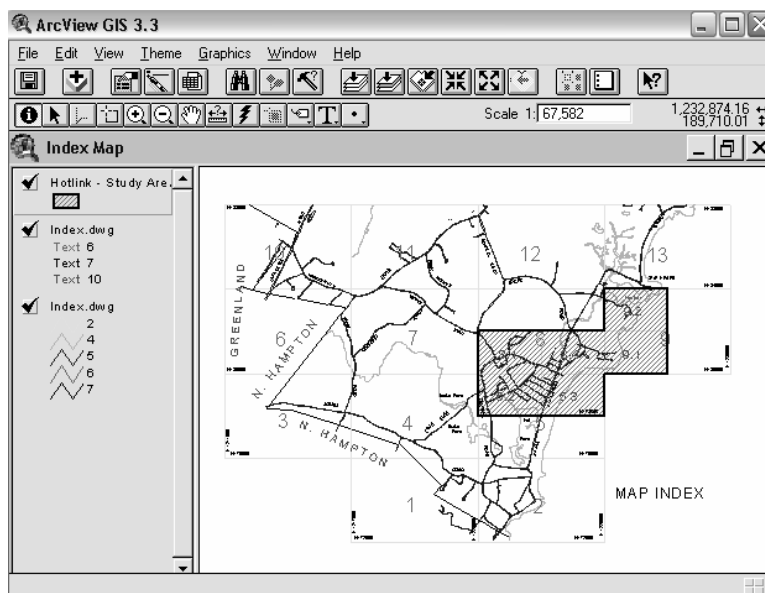


Figure 1. Using GIS Software to Help Land Use and Spatial Planning

Nowadays, the field of computing for urban and regional planning is continuously advanced through various disciplinary areas, including geographic information system (GIS). Budic (2000) states that GIS as applied in the field of urban and regional planning should advance the following goals of urban and regional planning:

1. Better quality (livable, safe, and aesthetically pleasing) of urban environments;
2. Environmentally and socially sustainable communities;
3. Effective spatial organization of urban activities (work, residence, commerce, and recreation);
4. "Smart growth" of urban areas;
5. Efficient communication between various urban functions;
6. Revitalization of deteriorated areas;
7. Variety of housing options;
8. Employment opportunities and economic development; and
9. Democratization of the planning and policy-making process.

To understand the role of GIS and technology in urban and regional planning, it is useful to refer to the theoretical motives of planning, which assume instrumental and communicative rationality as two key frames for planning. Instrumental (*functional*) rationality is based on a positivist ideal, which gathered information and scientific analysis at the basic of planning. Communicative (*substantive or procedural*) rationality focuses on an open and inclusive planning process, public participation, dialog, consensus building, and conflict resolution (Innes, 1996). Participants in the planning process rely on many types of "information," including the formal analytic reports and quantitative measures and the understandings and meanings attached to planning issues and activities (Innes, 1998). Indeed, GIS and technology have begun to contribute to the planning practice, and in some areas the developments transcend the "communicate versus calculate" dichotomy.



Figure 2. Indonesia Spatial Planning Website
Sources: Bakorsutanal and Departemen PU

Indonesia has decided to start in implementing a GIS in the comprehensive land use process. Some departments such as ministry of public services in cooperation with national mapping board and ESRI Indonesia have prepared some information about GIS of Indonesia. Subsequently, many of provinces and regions also have designed their land use and spatial planning using GIS. However, many provinces do not have a comprehensive GIS program and either not socialized well. Government and local parliament should visually understand and portray the working relationships of the land and policies and regulations that prescribe the particular uses. Inventory modeling provides need information that portrays how much of a particular resource will or could be affected. This procedure allows for the most common method of analysis, known as observations that assist in providing sensible land use decisions that work. GIS also allows for an area to be broken down into smaller jurisdictions, areas or governmental sections. In the case of land use planning, it allows township level government to be looked in an individualized manner. Displaying data provides an invaluable, often under utilized awareness or visual inventory of what is occurring in the county or in a particular township. GIS can and will provide policymakers an ever "present backdrop" for evaluating particular thoughts or specific recommendations as they pertain to the entire area (Branch, 1985).

ANALYSIS

Obstacles in Implementing GIS

There are several obstacles found in implementing GIS to land use and spatial planning. First problem that planner face is significant processing and database costs. Sometimes, it is very hard to convince the parliament or the local government that GIS is very important to support the development of one region, although it costs a lot. Secondly, a planner always notices data collection. The effort put into database development is sometimes so immense that only little time is left for analysis and designing plans and policies. Another problem that may comes up, since planning databases are usually derived by compiling data from multiple sources and of varying

quality and scales, it is needed to apply the integration of the data. The integration of available data sets is one way to reduce database development time. For example, remote sensing data acquired via satellites or airborne camera, which is proven very useful particularly in mapping land use change (Mesey, 1997).

Budic (2000) emphasizes another challenge in implementing GIS in urban and regional planning is to develop training materials that suit to the planning professionals, to secure infrastructure for GIS technology for teaching and research, access and equity and to develop a code of ethics for GIS development and use among the community.

Furthermore Hammond (1996) states that with local planning departments limited amount of time, money, personnel and information developing a strong, well done comprehensive land use plan can be a difficult task. As a result, land as a resource is often squandered by under utilization or over use that cause environmental degradation.

CONCLUSION AND POLICY IMPLICATION

To reach a better land use planning process it needs to be a large investment in Geographic Informational Systems. By creating visual map as the representations of the area as well as the important data that is attributed to these features, we have a better understanding to what is occurring on the land. Having this type of data it will improve many economies, environment and resolve many land use disagreements. Data that is readily available will improve the overall effectiveness of the land use planning procedure. Land as a resource is our most important asset and the wise utilization of this resource should be demanded and expected.

A policy environment that is conducive to GIS activities and stimulates geographic information development and use, is strengthening for the scientific and the planning process. The policies that would help advance the application of geospatial technologies and tools in urban and regional planning practice are in the areas of database development, standardization, access to data,

tool building and integration, technology transfer and legal framework.

In order to generate the sustainability of a comprehensive organized land use and spatial planning, GIS courses have been introduced as an important component in the undergraduate and graduate planning curricula. GIS-related capabilities, techniques, and methods contribute to several skill areas of professional planners, including analytical/research, communication, and data processing.

REFERENCES

- Banovetz, James M. 1984. *Small Cities and Counties*. International City Management Association Washington D.C. 254 pp.
- Brail, R.K., 1987, *Microcomputers in Urban Planning and Management* (New Brunswick, NJ: Center for Urban Policy Research)
- Branch, Melville C. 1985. *Comprehensive City Planning*. Planners Press, Washington D.C. 238 pp.
- Budic, Z.D., 2000, Geographic Information Science Implication for Urban and Regional Planning. *URISA Journal Vol. 12 No. 2*, 81 - 93.
- Cullingsworth, J. Berry 1993. *The Political Culture of Planning*. Routledge Inc., New York, 350 pp.
- Environmental Systems Research Institute, Inc. 1999. Getting to Know ArcView GIS. 3rd ed. ESRI: Redlands, California.
- French, S.P. and L.L. Wiggins, 1990, California Planning Agency Experiences with Automated Mapping and Geographic Information Systems. *Environment and Planning B*, 17(4), 441-450.
- Friedmann, J., 1987, *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action* (Princeton, NJ: Princeton University Press).
- Hammond, Allen L. 1996. *World Resources: The Urban Environment*. Oxford University Press, New York, 375 pp.
- Innes, J. E., 1996, Planning Through Consensus Building: A New View of the Comprehensive Planning Ideal. *Journal of American Planning Association*, 62(4), 460-472.
- Innes, J. E., 1998, Information in Communicative Planning. *Journal of the American Planning Association*, 64(1), 52-63.
- Isberg, Gunner C. 1975. *Local and Regional Planning in Minnesota*. The Metropolitan Council, Minneapolis, 187 pp.
- Mandelbaum, S.J., 1996, Making and Braking Planning Tools. *Computers, Environment and Urban Systems*, 20(2), 71-84.
- Mesey, V., 1997, Remote Sensing of Urban Systems: Hierarchical Integration with GIS. *Computers, Environment, and Urban Systems*, 21(3/4), 175-187.
- Meshenberg, Michael J. 1976. *The Language of Zoning*. American Society of Planning Officials Chicago, 52 pp.
- Miller, G. Tyler Jr. 1994. *Living in the Environment*. Wadsworth Publishing Co. New Jersey, 700 pp.

PENGARUH OTONOMI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN SEKTOR-SEKTOR BERPOTENSI YANG DAPAT DIKEMBANGKAN DI PEMERINTAH KOTA MEDAN

Keriahen Tarigan

Alumnus S2 PWD SPs USU

***Abstract:** Regional autonomy defines as the delegation authority of central government including delegation of finance, infrastructure and human resource. Some potential sources of local revenue of Medan are: (1) Municipal tax including Road light tax and (2) Retributions consist of: public hospital, regional wealth, parking, and solid waste. Medan municipality should consider Revenue Maximizing Tax Rate in order to get maximum tax revenue.*

***Keywords:** regional autonom, local revenue and potential sectors*

PENDAHULUAN

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, propinsi, dan daerah. Undang-Undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan dasar hukum tentang desentralisasi fiskal, menjelaskan pembagian baru mengenai sumber pemasukan dan transfer antar pemerintah.

Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2004 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia Memutuskan: bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu direvisi dan terbitlah Undang-Undang **No. 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah direvisi menjadi Undang-Undang **No. 33 Tahun 2004** (UU. RI, No.32 dan 33, 2004).

Spyckerelle, Luc (2001), menggambarkan perubahan sebelum dan setelah era otonomi dengan istilah *financial follows function*, atau keterkaitan antara kewenangan dengan keuangan. Konsekuensi dari perbedaan tersebut, pemerintah daerah harus mengelola pembangunan ekonomi dan keuangan daerahnya dengan lebih baik dan berhasil guna dibandingkan dengan sebelumnya. Adanya *financial follows function* terlihat dengan jelas pada perilaku makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, di mana sebelumnya APBD tingkat II berasal dari pusat, propinsi, dan tingkat II sendiri dengan porsi kewenangan pusat dan propinsi yang sangat besar dibandingkan kewenangan tingkat II.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia pada umumnya dan Kota Medan pada khususnya di samping itu daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Dengan kondisi seperti ini, peran investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*enginee of growth*). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek *multiplier* yang besar.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dihadapkan pada dua hasil guna yang harus dicapai yaitu:

1. Peningkatan penerimaan daerah, baik dari sumber bagi hasil, PADS (pendapatan asli daerah sendiri), ataupun sumber yang lainnya.
2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengeluaran keuangan daerah sehingga tepat pada sasaran pembangunan daerah dan tidak terjadi kebocoran, sesuai dengan konsep *financial follows function* itu sendiri.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan dalam Pasal 157 bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 1. Hasil pajak daerah;
 2. Hasil retribusi daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah;
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. (UU No. 32, 2004).

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka beberapa hal yang merupakan permasalahan yang difokuskan dalam penelitian ini, yakni:

- a. Bagaimana pelaksanaan perimbangan keuangan era otonomi daerah di Pemerintah Kota Medan.
- b. Bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan otonomi daerah terhadap PAD Pemerintah Kota Medan.
- c. Sektor-sektor mana saja dari PAD yang berpotensi untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan PAD Pemerintah Kota Medan.

METODE

Penelitian dilakukan di Pemerintah Kota Medan. Dipilihnya Kota Medan sebagai sasaran penelitian dengan alasan bahwa Kota

Medan Sebagai ibukota Propinsi Sumatera Utara yang nantinya diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Utara, bahkan daerah lain.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression*) dengan persamaan yaitu:

$$Y = \beta_0 X_1^{\beta_1} + X_2^{\beta_2} + X_3^{\beta_3} + X_4^{\beta_4} + D^{\beta_5} + \mu \dots \dots \dots (1)$$

Di mana:

- Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp/bulan)
- X1 = Hasil pajak daerah (Rp/bulan)
- X2 = Retribusi daerah (Rp/bulan)
- X3 = Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Rp/bulan)
- X4 = Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Rp/bulan)
- D = *Dummy* variabel untuk melihat pengaruh otonomi daerah terhadap PAD (0 sebelum otonomi dan 1 setelah otonomi)
- μ = *Error term*
- β_0 = *Intercept*
- β_1 - β_5 = Koefisien Regresi

Persamaan tersebut ditransformasi kedalam bentuk logaritma untuk mengurangi situasi heteroskedastisitas (Gujarati,1988), sehingga bentuk persamaan tersebut menjadi:

$$\ln Y = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \beta_4 \ln X_4 + \beta_5 D + \mu \dots \dots \dots (2)$$

Model tersebut di atas di estimasi dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) melalui bantuan perangkat lunak komputer SPSS ver. 12. Untuk mengetahui sektor berpotensi yang dapat dikembangkan dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT dengan analisis SWOT maka dapat diuraikan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), ancaman (*threats*), analisis SWOT ini memiliki kelebihan sebagai model yang sederhana, menyeluruh dan fleksibel (Ferdy Rangkuti, 1999). Analisis SWOT dapat mengidentifikasi apa saja yang harus

dilaksanakan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang yang berkaitan dengan data yang ada.

HASIL

Kota Medan sebagai Ibu Kota Propinsi Sumatera Utara mempunyai harapan yang besar atas pelaksanaan otonomi daerah, sehingga Pemerintah Kota Medan harus lebih mampu meningkatkan sumber penerimaan asli daerahnya sebagai sumber PAD dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, karena PAD adalah salah satu dasar penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan suatu daerah yang berstatus otonom.

Sebagai gambaran keuangan Pemerintah Kota Medan dapat dilihat perkembangan PAD selama 2 (dua) tahun terakhir pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perkembangan PAD Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2000 – 2001 (milyar rupiah)

Kota	Tahun Anggaran		Rata-rata Penerimaan
	2000	2001	
Medan	55,76	88,23	71,99

Sumber: Dispenda Pemerintah Kota Medan, 2005

Berdasarkan Tabel 1 di atas PAD Kota Medan selama kurun waktu 2 (dua) tahun (2000-2001) pada dasarnya menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Hal ini dapat dilihat dari jumlah rata-rata penerimaan PAD dalam kurun waktu tersebut adalah sebesar Rp 71,99 milyar dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 58,24% per tahun.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu diadakan suatu kajian yang berfokus pada PAD Pemerintah Kota Medan dengan judul “Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sektor-sektor berpotensi yang dapat dikembangkan di Pemerintah Kota Medan”.

Pos bagi hasil pajak secara keseluruhan memberikan kontribusi rata-rata 21,65% per tahun terhadap bagian dana perimbangan dengan pertumbuhan rata rata 43,80% per tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Secara keseluruhan untuk pos bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam mengalami tingkat penurunan rata-rata (31,47%) per tahun dengan kontribusi rata-rata 0,23% per tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.

Secara keseluruhan untuk pos bagi hasil pajak dari pemerintah propinsi memberikan kontribusi rata-rata 18,74% per tahun terhadap dana perimbangan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 44,27% per tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.

Secara keseluruhan untuk pos DAU&DAK dari pemerintah pusat memberikan kontribusi yang terbesar yaitu rata-rata 55,08% per tahun terhadap dana perimbangan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 9,97% pertahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.

Secara keseluruhan untuk pos lain-lain pendapatan yang sah dari pemerintah pusat memberikan kontribusi rata-rata 4,12% per tahun terhadap dana perimbangan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 129,77% per tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.

Berdasarkan data-data maka dapat diketahui proporsi dan tingkat pertumbuhan masing-masing pos dalam pelaksanaan perimbangan keuangan di Pemerintah Kota Medan tahun 2002-2004 seperti dalam Tabel 3.

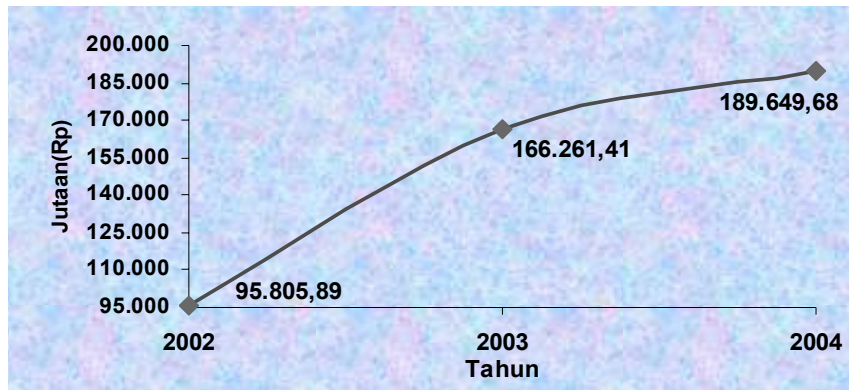
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Era Otonomi Daerah di Pemerintah Kota Medan beberapa tahun dapat dilihat pada Tabel 4.

Secara keseluruhan PAD di Pemerintah Kota Medan selama Tahun 1999-2004 terus mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 6.

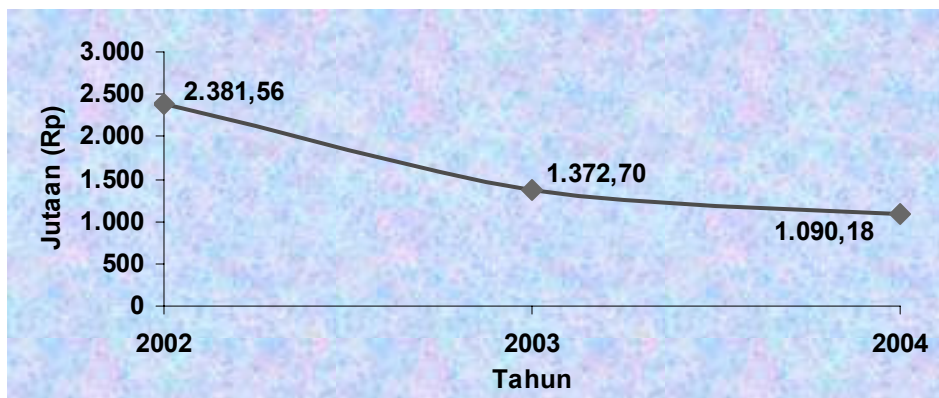
Tabel 2. Bagian Dana Perimbangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2002 – 2004 (jutaan rupiah)

No	Uraian	T A H U N			Rata-rata Pertumbuhan/ Tahun(%)
		2002	2003	2004	
I	BAGIAN DANA PERIMBANGAN				
	POS BAGI HASIL PAJAK				
1	Pajak Bumi dan Bangunan	48.651,86	79.779,86	93.994,82	40.90
2	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	21.522,31	44.429,42	55.048,55	65.17
3	Bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 21	23.476,41	42.052,14	40.606,31	37.84
4	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	2.155,31	-	-	-
	JUMLAH	95.805,89	166.261,41	189.649,68	43.80
II	POS BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM				
1	Iuran Hasil Hutan	-	-	-	-
2	Iuran Hak Pengusaha Hutan	554,93	241,74	490,59	23.25
3	Pungutan Hasil Perikanan	-	339,12	157,52	-26,78
4	Minyak Bumi	51,44	-	223,22	-
5	Gas Alam	428,68	743,64	218,85	1.45
6	Pemberian Hak Atas Tanah Pemerintah	1.346,51	48,20	-	-
	JUMLAH	2.381,56	1.372,70	1.090,18	-31.47
III	POS BAGI HASIL PAJAK DARI PEMERINTAH PROPINSI				
1	BHP Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	65.919,64	87.101,13	131.016,25	41.28
2	BHP Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPB-KB)	18.765,21	26.715,93	27.555,29	22.76
3	Bagian dari Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	109,83	-	-	-
4	Bagian dari Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah(APU)	-	1.854,22	2.094,56	-
5	Bantuan Dana Pembangunan	-	15.000,00	15.000,00	-
	JUMLAH	84.794,67	130.671,28	175.666,10	44.27
IV	DAU DAN DAK				
1	Dana Alokasi Umum	341.030,00	396.670,00	404.989,98	9.21
2	Dana Alokasi Khusus Reboisasi	319,13	-	-	-
3	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi	-	-	6.500,00	-
	JUMLAH	341.349,13	396.670,00	411.489,98	9.97
V	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
1	Dana penyeimbang Dari Pemerintah Pusat (Kontijensi)	10.348,07	36.370,00	30.387,00	117.51
2	Bantuan Pembangunan Dari Pemerintah Pusat (BBBKBN)	-	-	4.660,93	-
3	Pendapatan Lainnya Yang Sah (Restitusi PPh Psl 21)	-	-	4.260,64	-
	JUMLAH	10.348,07	36.370,00	39.308,58	129.77
VI	Dana Darurat (Bantuan Bencana Alam)				
	Bantuan Bencana Alam	3.693,50	-	-	-
	JUMLAH	3.693,50	0,00	0,00	
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN (1+2+3+4)	538.372,83	731.345,40	817.204,51	23.79

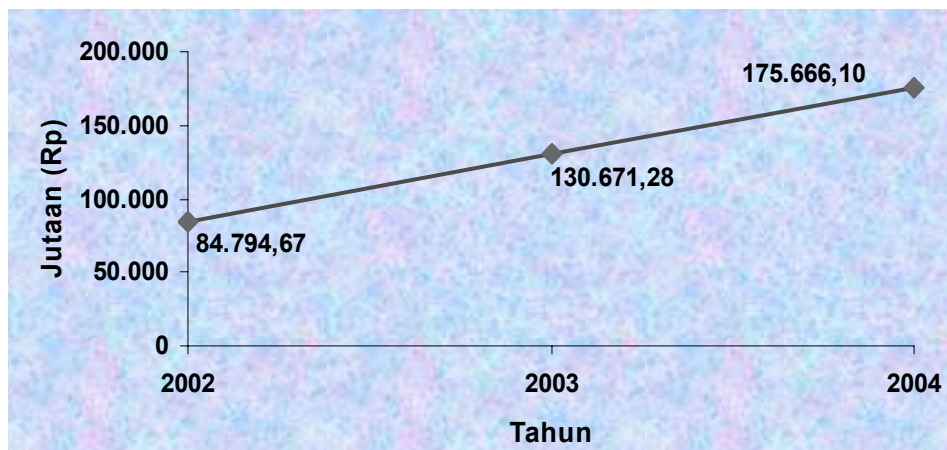
Sumber: Dispenda, Pemerintah Kota Medan 2005 (data diolah)



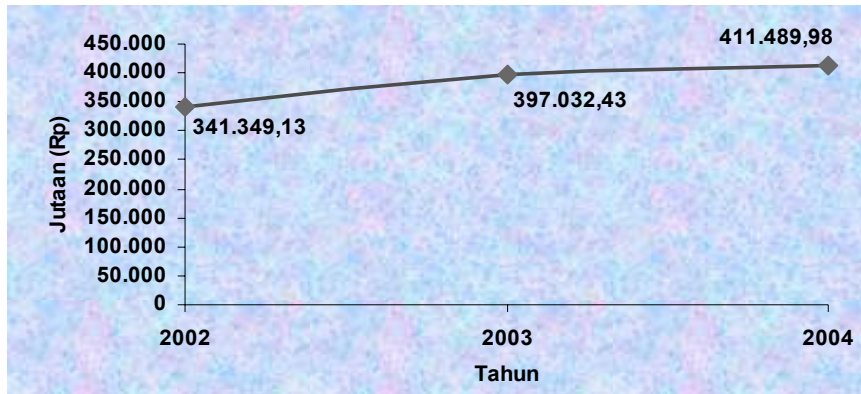
Gambar 1. Grafik Penerimaan Bagi Hasil Pajak di Pemerintah Kota Medan Tahun 2002 – 2004 (jutaan rupiah)



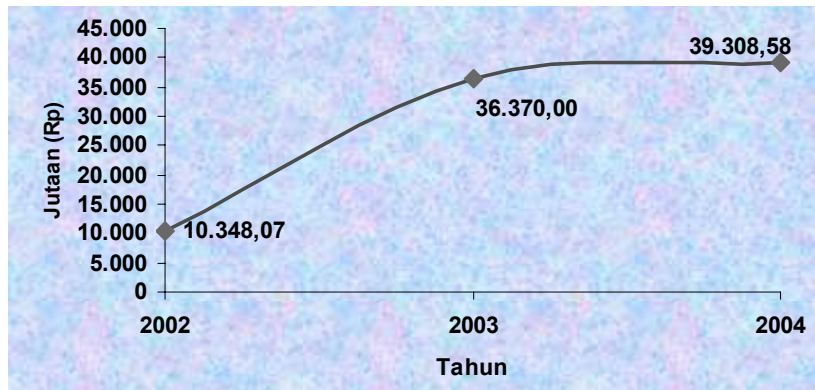
Gambar 2. Grafik Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam di Pemerintah Kota Medan Tahun 2002 – 2004 (jutaan rupiah)



Gambar 3. Grafik Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi di Pemerintah Kota Medan Tahun 2002 – 2004 (jutaan rupiah)



Gambar 4. Grafik DAU dan DAK di Pemerintah Kota Medan Tahun 2002 – 2004 (jutaan rupiah)



Gambar 5. Grafik Lain-Lain Pendapatan yang Sah di Pemerintah Kota Medan Tahun 2002 – 2004 (jutaan rupiah)

Tabel 3. Kontribusi dan Pertumbuhan Bagian Dana Perimbangan dalam Era Otonomi Daerah di Pemerintah Kota Medan Tahun 2002 – 2004

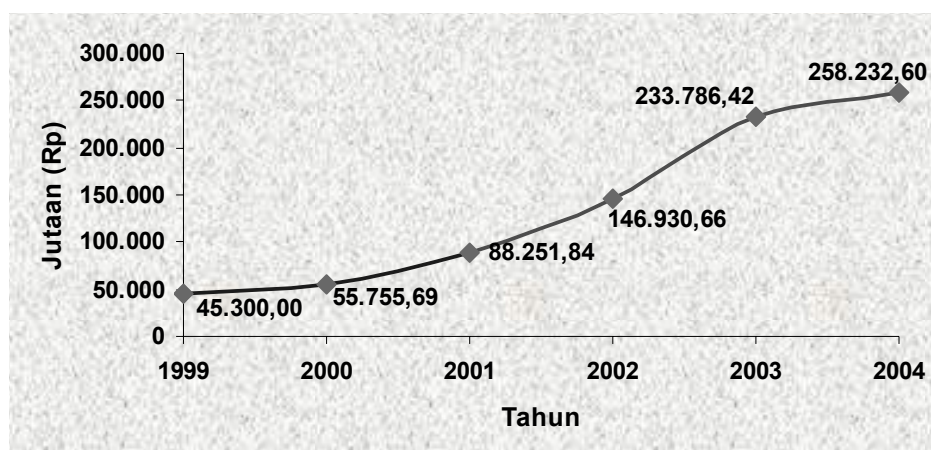
Tahun	Bagi hasil pajak Persentase (%)		Bagi hasil bukan Pajak Persentase (%)		Bagi hasil pajak Pem Propinsi Persentase (%)		DAU-DAK Persentase (%)		Lain-lain pendapatan Persentase (%)		Dana Darurat Persentase (%)		Dana perimbangan (Jutaan Rp)	Pertumbuhan (%)
	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi		
2002	-	17,80	-	0,44	-	15,75	-	63,40	-	1,92	-	0,69	538.372,83	-
2003	73,54	22,73	-42,36	0,19	54,10	17,87	16,21	54,24	251,47	4,7	0,00	0,00	731.345,40	35,84
2004	14,07	23,21	-20,58	0,13	34,43	21,50	3,74	50,35	8,08	4,81	0,00	0,00	817.204,51	11,74
Rata-rata	43,80	21,65	-31,47	0,23	44,27	18,74	9,97	55,08	129,77	4,12	0,00	0,18		23,79

Sumber: Dispenda, Pemerintah Kota Medan 2005 (data diolah)

Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 1999 – 2004 (jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun					
		1999	2000	2001	2002	2003	2004
A. Bagian Pendapatan Asli Daerah							
1	I. Pajak Daerah	28.666,98	36.611,26	58.157,72	80.418,34	132.234,57	145.585,45
2	II. Retribusi Daerah	14.667,91	18.369,17	28.488,82	60.854,03	92.067,05	106.438,56
3	III. Bagian Laba Usaha Daerah	274,40	102,27	613,50	1.477,57	1.063,10	1.000,00
4	IV. Lain-Lain PAD yang Sah	1.690,71	672,98	991,81	4.180,71	8.421,69	5.208,59
Jumlah P A D S (1+2+3+4)		45.300,00	55.755,69	88.251,84	14.6930,66	233.786,42	258.232,60

Sumber: Dispenda, Pemerintah Kota Medan 2005 (data diolah)



Gambar 6. Grafik PAD di Pemerintah Kota Medan Tahun 1999-2004 (jutaan rupiah)

Tabel 5. Hasil Uji Statistik Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan

Variabel	Model		Significant (p)
	Koefisien Regresi	t _{-hitung}	
Konstanta	2,709	5,173*	0,000
Pajak Daerah	0,763	19,018*	0,000
Retribusi Daerah	0,044	5,412*	0,000
Laba BUMD	0,009	2,347*	0,022
Lain-lain Pendapatan	0,051	2,980*	0,004
Otonomi daerah	0,262	4,596*	0,000
t _{-tabel}	1,668		
F _{-tabel}	2,35		
R ²	= 0,959		
Adj.R.Square	= 0,956		
F _{-hitung}	= 309,130		
D/W	= 1,514		

* = Signifikan pada pengujian $\alpha = 5\%$ (1,668)

** = Signifikan pada pengujian $\alpha = 10\%$ (1,294)

PEMBAHASAN

Berdasarkan variabel tersebut di atas maka diperoleh hasil estimasi PAD diuji secara statistik dengan $\alpha = 5\%$, seperti ditampilkan pada Tabel 5.

Hasil estimasi menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Ln } \hat{Y} = 2,709 + 0,763 \text{ LnX}_1 + 0,044 \text{ LnX}_2 + 0,009 \text{ LnX}_3 + 0,051 \text{ LnX}_4 + 0,252D$$

Berdasarkan Tabel 5 di atas maka diperoleh hasil uji statistik dengan memasukkan seluruh variabel bebas meliputi, (1) hasil pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) laba BUMD, (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan (5) dummy variabel untuk melihat pengaruh otonomi daerah terhadap PAD (0 sebelum

otonomi dan 1 setelah otonomi) secara serentak dengan hasil sebagai berikut:

a. Pajak daerah

Pajak daerah memberikan pengaruh yang signifikan pada pengujian $\alpha = 5\%$ terhadap PAD Kota Medan, di mana nilai t-stat lebih besar dari t-tab(5:72) (t-stat > t-tab); 19,018 > 1,668.

Koefisien regresi 0,763 pada variabel pajak daerah artinya secara statistik setiap peningkatan penerimaan pajak daerah 1% akan meningkatkan PAD 0,763% pada saat konstanta 2,620 (ceteris paribus).

Dengan otonomi daerah berarti telah memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespons tuntutan masyarakat daerah

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena kewenangan membuat kebijakan (perda) sepenuhnya seperti pajak daerah yang merupakan wewenang daerah otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan akan dapat berjalan lebih cepat dan lebih berkualitas. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah (PAD), sumber daya manusia yang dimiliki daerah, serta kemampuan daerah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada di daerah otonom (Soenarto, 2001).

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah memberikan pengaruh yang signifikan pada pengujian $\alpha = 5\%$ terhadap PAD Kota Medan, di mana nilai t_{stat} lebih besar dari $t_{\text{tab}(5;72)}$ ($t_{\text{stat}} > t_{\text{tab}}$); $5,412 > 1,668$.

Koefisien regresi 0,044 pada variabel retribusi daerah artinya secara statistik setiap peningkatan penerimaan retribusi daerah 1% akan meningkatkan PAD 0,044% pada saat konstanta 2,620 (*ceteris paribus*).

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak daerah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. (<http://www-Equiv>. Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001).

c. Laba BUMD

Laba BUMUD memberikan pengaruh yang signifikan pada pengujian $\alpha = 5\%$ terhadap PAD Kota Medan, di mana nilai t_{stat} lebih besar dari $t_{\text{tab}(5;72)}$ ($t_{\text{stat}} > t_{\text{tab}}$); $2,347 > 1,668$.

Koefisien regresi 0,009 pada laba BUMD artinya secara statistik setiap peningkatan penerimaan laba BUMD 1%

akan meningkatkan PAD 0,009% pada saat konstanta 2,620 (*ceteris paribus*).

Berdasarkan *item* yang diberlakukan atas bagian laba usaha daerah dapat dilihat bahwa dari 2 *item* pada tahun 2004 hanya 1 *item* yang terelisasi dari PD Pasar. Hal ini menunjukkan bahwa dari pos bagian laba perusahaan milik daerah belum optimal memberikan sumbangan terhadap PAD Pemerintah Kota Medan.

Dengan kondisi otonomi, peran investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*enginee of growth*). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek *multiplier* yang besar (Spyckerelle, Luc, 2001).

d. Lain-lain pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah memberikan pengaruh yang signifikan pada pengujian $\alpha = 5\%$ terhadap PAD Kota Medan, di mana nilai t_{stat} lebih besar dari $t_{\text{tab}(5;72)}$ ($t_{\text{stat}} > t_{\text{tab}}$); $2,980 > 1,668$.

Koefisien regresi 0,051 pada variabel lain-lain pendapatan yang sah artinya, secara statistik setiap peningkatan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 1% akan meningkatkan PAD 0,051% pada saat konstanta 2,620 (*ceteris paribus*).

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- jasa giro;
- pendapatan bunga;
- keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah (UU 33, Tahun 2004).
- Otonomi daerah

Variabel Otonomi daerah memberikan pengaruh yang signifikan pada pengujian $\alpha = 5\%$ terhadap PAD Kota Medan, di mana nilai t_{stat} lebih besar dari $t_{\text{tab}(5;72)}$ ($t_{\text{stat}} > t_{\text{tab}}$); $4,596 > 1,668$, artinya secara statistik keberadaan otonomi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan PAD Kota Medan pada saat konstanta 2,620 (*ceteris paribus*).

Berdasarkan Nilai $F_{-tab(5;72)}$ dan F_{-hit} diperoleh $F_{-hit} > F_{-tab}$; $309,130 > 2,35$, artinya secara serentak variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat PAD Kota Medan dalam era otonomi daerah.

Secara serentak variabel bebas meliputi; (1) hasil pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) laba BUMD, (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan (5) *dummy* variabel untuk melihat pengaruh otonomi daerah terhadap PAD (0 sebelum otonomi dan 1 setelah otonomi), dapat menjelaskan variasi perubahan yang terjadi pada variabel PAD Kota Medan sebesar 95,6%, hal ini ditunjukkan oleh nilai *adj.R-Square* sebesar 0,956 sedangkan sisanya 4,4% dipengaruhi oleh faktor lain.

Setelah mendapatkan gambaran umum tentang PAD, selanjutnya mengidentifikasi

dan menganalisis pos-pos mana saja dari PAD yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah di Pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan data PAD setelah diurutkan maka akhirnya diperoleh pos yang paling besar kontribusinya terhadap PAD adalah pos; (1) pajak daerah 56,43% dan (2). pos retribusi daerah 41,26%, selanjutnya dari kedua pos tersebut diidentifikasi sektor yang “berpotensi” dan “dominan” untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan PAD dengan kriteria memberikan kontribusi mencapai angka akumulasi 75% dari per masing-masing sektor PAD. Setelah diperoleh angka akumulasi 75% maka sektor yang “berpotensi” dan “dominan” dimasukkan ke dalam matriks sebagai berikut:

Tabel 6. Matriks Realisasi/Potensi PAD Pemerintah Kota Medan Tahun 2004

		Kontribusi Dominan	
		Tidak	Ya
Potensi Penerimaan yang Lebih Tinggi	Ya	a. Pajak Parkir b. Retribusi Jasa Usaha Pengolahan Air Limbah c. Retribusi Izin Tempat Khusus Parkir d. Retribusi Penyediaan Ketenaga Listrikan e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran f. Retribusi Izin Usaha Bidang Perikanan g. Retribusi Izin Gangguan h. Retribusi Terminal i. Retribusi Pelayanan dan Izin Bidang Perhubungan	a. Pajak Penerangan Jalan b. Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Negara d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum e. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
	Tidak	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta/RUTR b. Retribusi Izin Usaha Perdagangan (RET, I, U, Perfilman) c. Retribusi Izin Pengelolaan, Pengeboran, Pengambilan, dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat e. Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, dan Tanda Daftar Gudang f. Retribusi Tempat Hiburan Rekreasi dan Lapangan Olah Raga g. Retribusi dari Pemasaran/Penjualan Ikan h. Retribusi Penyedotan Septictank i. Retribusi Izin Trayek Angkutan Umum j. Retribusi Pelayanan dan Izin Ketenagakerjaan k. Retribusi Pelayanan Kesehatan l. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	a. Pajak Restoran b. Pajak Hotel c. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) d. Pajak Reklame e. Pajak Hiburan f. Retribusi Izin Usaha g. Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan

Berdasarkan matriks realisasi/potensi PAD Kota Medan maka sebagai sektor yang dominan dan berpotensi dari PAD untuk dikembangkan adalah:

A. Pajak Daerah

1. Pajak Penerangan Jalan

B. Retribusi Daerah meliputi:

1. Retribusi Rumah Sakit Umum Pirngadi
2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
4. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

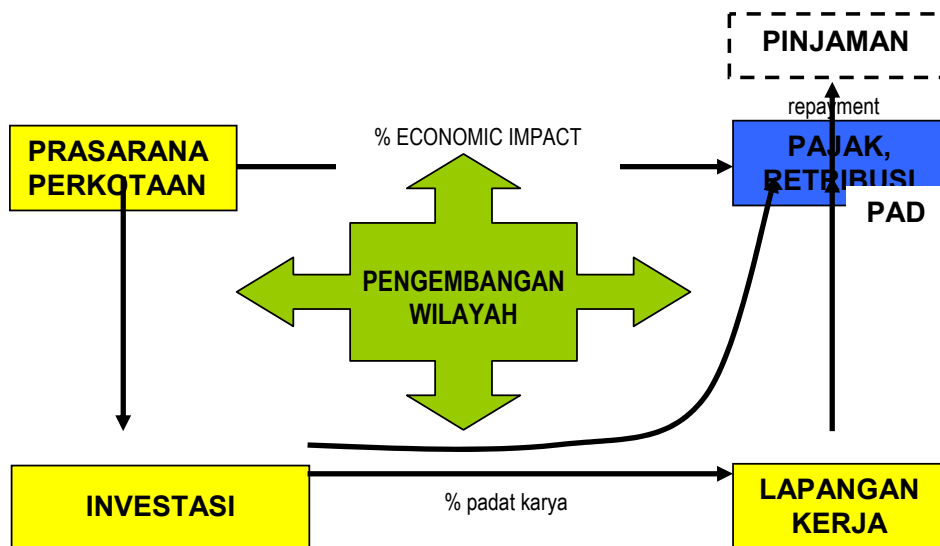
Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Pengembangan Wilayah

Salah satu faktor utama yang mengakibatkan daerah tidak berkembang adalah tidak diberikannya kesempatan yang memadai bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini didorong oleh kuatnya sentralisasi kekuasaan terutama di bidang politik dan ekonomi. Akibat dari sentralisasi yang berlebihan tersebut tidak saja mengakibatkan kesenjangan hubungan pemerintah pusat dan daerah yang lebar tetapi juga mengusik rasa keadilan masyarakat di daerah karena pemerintah pusat dianggap terlalu banyak mencampuri urusan daerah dan juga menutup kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas serta mendapatkan hak-hak ekonomi, sosial, dan politiknya. Dalam rangka mendorong

pembangunan daerah telah mulai dikembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab serta peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat.

Masalah pokok dalam pengembangan otonomi daerah adalah luasnya ruang lingkup pembangunan daerah terutama dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang belum didukung oleh kesiapan dan kemampuan aparatur pemerintah daerah secara memadai serta perangkat peraturan bagi pengelolaan sumber daya pembangunan di daerah.

Krisis ekonomi memberikan dampak yang berbeda terhadap daerah meskipun pada dasarnya menurunkan perekonomian di semua daerah. Pengembangan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah sebagai upaya peningkatan pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan antardaerah mengalami hambatan keterbatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam, ketersediaan modal, kemitraan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Masalah lain yang menghambat adalah ketidaktertiban pemanfaatan ruang yang didasarkan pada penataan ruang, pemilikan dan pemanfaatan tanah yang mengakibatkan degradasi lingkungan. Pengembangan wilayah juga dibatasi oleh kondisi dan ketersediaan prasarana dan sarana yang ada yang ditentukan oleh luasnya wilayah yang harus dijangkau dan keterbatasan dana.



Gambar 6: Pengembangan Ekonomi Lokal

Sumber: Local Economic Development

Karena pada hakikatnya pengembangan ekonomi wilayah merupakan proses yang mana pemerintah daerah dan/atau kelompok berbasis komunitas mengelola sumber daya yang ada dan masuk kepada penataan kemitraan baru dengan sektor swasta, atau di antara mereka sendiri, untuk menciptakan pekerjaan baru dan merangsang kegiatan ekonomi wilayah, maka diharapkan akan terjadi pengembangan wilayah.

Ciri utama pengembangan ekonomi lokal (wilayah) adalah pada titik beratnya pada kebijakan "*endogenous development*" menggunakan potensi sumber daya manusia, institutional dan fisik setempat. Orientasi ini mengarahkan kepada fokus dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi (Blakely, 1989).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisis data, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perimbangan keuangan era otonomi daerah di Pemerintah Kota Medan berlaku mulai tahun 2002 yang terdiri dari:
 - Pos bagi hasil pajak meliputi; pajak bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), bagi hasil pajak penghasilan pasal 21.
 - Pos bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam meliputi; Iuran hak pengusaha hutan, pungutan hasil perikanan, minyak bumi, dan gas alam.
 - Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pelaksanaan perimbangan keuangan tersebut di Pemerintahan Kota Medan telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pendapatan Asli Daerah meliputi variabel; pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, lain-lain PAD yang sah dan otonomi daerah, berpengaruh signifikan secara statistik pada pengujian $\alpha = 5\%$ terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan.
3. Hasil pengujian statistik secara serentak (Uji F), variabel bebas meliputi; pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, lain-lain PAD yang sah dan otonomi

daerah memberikan pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (PAD) di Pemerintah Kota Medan.

4. Sektor yang berpotensi atas PAD di Pemerintahan Kota Medan untuk dapat dikembangkan adalah:
 - a. Pajak daerah; pajak penerangan jalan
 - b. Retribusi daerah meliputi:
 - Retribusi Rumah Sakit Umum Pirngadi
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
 - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

SARAN

Dari kesimpulan yang dirangkum di atas, maka penulis ingin menyumbangkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu menegaskan kepada pemerintah pusat, agar memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah seperti melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak pemerintah pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah dalam mendukung peningkatan PAD, seperti Pelabuhan Indonesia I, Angkasa Pura II, Telkomsel dan Satelindo dan menggali potensi PAD yang baru seperti pembuatan pasar induk.
2. Hendaknya Pemerintah Kota Medan dalam upaya menggali sumber-sumber keuangan dari pajak daerah agar menjadikan pertimbangan "*revenue maximizing tax rate*" artinya dengan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak dan respons harga dan kuantitas barang terhadap pengenaan pajak, sebagai bahan informasi bahwa pengenaan tarif pajak daerah yang lebih tinggi secara teoretis tidak selalu menghasilkan total penerimaan maksimal.
3. Dalam menyusun Target PAD perlu dievaluasi siapa yang menentukan target dan siapa yang melaksanakan pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Hendaknya prioritas utama dalam analisis SWOT agar dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam pembuatan kebijakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agung, Ryadi Dkk., 2002. *Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sukoharjo. Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)*
- Agustino, Leo., 2004. "Salah Paham Otonomi Daerah", *Harian Pikiran Rakyat*. 26 Februari 2004.
- Arsyad, Lincolyn., 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, BPFE-UGM, Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2003. *Medan Dalam Angka 2003*, Badan Pusat Statistik Kota Medan.
- Bartol, K.M., & Martin, D.C., 1991, *Management*, New York: McGraw Hill, Inc.
- Blakely, Edward., J. 1994. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*, Sage Publications.
- Brennan, Geoffrey dan Buchanan, James., 1981. "Tax Limits and The Logic of Constitutional Restriction, dalam "Democratic Choice and Taxation "A Theoretical and Empirical Analysis", Hettich, Walter and Winer, Stanley, L. Cambridge University Press.
- Davey, K. J., 1988. *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, UI-Press, Jakarta.
- Devas, Nick, dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI-Press, Jakarta
- Gujarati, Damodar. 1988. *Ekonometrika Dasar. Terjemahan*. PT. Erlangga. Jakarta
- Johnson, G., Scholes, K., & Sexty, R.W. 1989. *Exploring Strategic Management*, Scarborough, Ontario: Prentice Hall.
- Kaho, Josep Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mardiasmo, D.R. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Munawar, Ismail. 2001. "Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah". Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, TEMA, Volume II, Nomor 1, Maret 2001
- Munir, Risfan, 2002. *Perencanaan Pengembangan Ekonomi Lokal (Local Economic Development) Specialist PERFORM Project*, Jakarta
- Musgrave, Richard A. dan Musgrave, Peggy B. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*, McGraw-Hill, New York
- Ray, David dan Gary Goodpaster. 2001. "Kebijaksanaan dan Institusi untuk Memastikan Perdagangan Intern yang Bebas berdasarkan Desentralisasi", makalah yang disajikan di Konperensi PEG/USAID mengenai Perdagangan Lokal, Desentralisasi dan Globalisasi, Jakarta, Indonesia.
- Rossen, Harvey, S. 1998. *Public Finance*, Richard D. Irwin, Illionis
- Sandy, I Made. 1992. *Pembangunan Wilayah*. Monograf. Bogor.
- Santoso, Singgih; 2000. *SPSS mengolah Data Statistik Secara Professional*, Elexmedia Komputindo Gramedia, Jakarta.
- Sarundajang, S. H. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Siagian, H. 1983. *Pembangunan Ekonomi Dalam Cita-Cita dan Realita*. Penerbit Alumni. Bandung.

Author Indeks

G

Gunawan, Randi, "Analisis Sumber Daya Air Daerah Aliran Sungai Bah Bolon sebagai Sarana Pendukung Pengembangan Wilayah di Kabupaten Simalungun dan Asahan", **2 (1): 17 – 27**

H

Hidayat, Paidi dan Sirojuzilam, "Kajian tentang Keuangan Daerah Kota Medan di Era Otonomi Daerah", **2 (1) : 1 – 9**

M

Malau, Yois Nelsari, "Analisis Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Kumuh di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai", **2 (1): 34 – 45**

P

Purba, Bernhard PJ, "Pengaruh Program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) terhadap Pengembangan Wilayah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Raya – Kabupaten Simalungun", **2 (1): 46 – 61**

R

Rujiman, "Perencanaan Kesempatan Kerja Tahun 2007 Wilayah Sumatera Utara ", **2 (1): 28 – 33**

S

Surya, Aldwin, "Kebijakan dan Praktik Pemilikan Rumah: Kajian Kasus di Kota Metropolitan Medan", **2 (1): 10 – 16**

Author Indeks

A

Ashirah, Nurul bte Othman dan Abdul Ghafar b. Ismail, "Fiscal Policy and Business Cycle in Muslim Countries", **2 (2): 62 – 74**

L

Lubis, Irsyad, "Peran Institusi Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Satu Kebijakan ke Arah Pengembangan Wakaf di Sumatera Utara", **2 (2): 99 – 109**

M

Miraza, Bachtiar Hassan, "Fungsi Transportasi dalam Pengembangan Wilayah", **2 (3): 85 – 89**

Mahalli, Kasyful, "Usaha Kecil dan Menengah dan Penyerapan Tenaga Kerja", **2 (2): 110 – 116**

P

Pratomo, Wahyu Ario, "The Impact of Economic Crisis on Wage and Employment ", **2 (2): 90 – 98**

Purboyo H.P., Heru, "Indikator Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten", **2 (2): 75 – 84**

Author Indeks

A

Afifuddin, Sya'ad dan Sinar Indra Kusuma, "Analisis Struktur Pasar CPO: Pengaruhnya terhadap Pengembangan Ekonomi Wilayah Sumatera Utara", **2 (3): 124 – 136**

H

Helmi, Syafrizal, "Regional Branding: Strategi Memasarkan Daerah", **2 (3): 117 – 123**

M

Miraza, Bachtiar Hassan, "Mengantisipasi Banjir Besar Kota Medan", **2 (3): 137 – 141**

P

Pratomo, Wahyu Ario, "Implementing Geographic Information System for Land Use and Spatial Planning", **2 (3): 150 – 155**

S

Sirojuzilam, "Perencanaan Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah (*Spatial Planning and Regional Planning*)", **2 (3): 142 – 149**

T

Tarigan, Keriachen, "Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sektor-Sektor Berpotensi yang Dapat Dikembangkan di Pemerintah Kota Medan" **2 (3): 156 – 167**

WAHANA HIJAU

Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah

INFORMASI BERLANGGANAN

(Biaya Berlangganan: Kota di Sumatera Rp 85.000/tahun dan Kota di luar Sumatera Rp 100.000/tahun)

LEMBAR PEMESANAN

Nama : _____
Alamat : _____
Kota : _____
Telepon : _____ Fax. _____ e-mail _____
Lembaga : _____

Pemesanan Tahun Terbitan : _____

Pembayaran Tunai Transfer

Transfer melalui
Rekening Bank Mandiri Cabang USU Medan
a.n. Muhammad Yusuf
No. Rekening: 106 – 00 – 0512719 – 9

Alamat Redaksi

Ruang Studio, Program Studi PWD (S2)/Perencanaan Wilayah (S3) Sekolah
Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Jl. Prof. T. Maas, Kampus USU
Medan 20155, Telepon 061-8212453
<http://pwd.usu.ac.id>

